

**ANALISIS KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN
RUANG FASILITAS SOSIAL (STUDI KASUS
KELURAHAN MOLINOW KECAMATAN
KOTAMOBAGU BARAT)**

SKRIPSI

Oleh:

**MARSA CIKITA MOKODONGAN
45 13 042 074**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

**ANALISIS KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN
RUANG FASILITAS SOSIAL (STUDI KASUS
KELURAHAN MOLINOW KECAMATAN
KOTAMOBAGU BARAT)**

SKRIPSI

Oleh:

**MARSA CIKITA MOKODONGAN
45 13 042 074**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

**ANALISIS KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN
RUANG FASILITAS SOSIAL (STUDI KASUS
KELURAHAN MOLINOW KECAMATAN
KOTAMOBAGU BARAT)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Teknik (S.T.)**

UNIVERSITAS

BOSOWA

OLEH

**MARSA CIKITA MOKODONGAN
45 13 042 074**

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Mahasiswa : Marsa Cikita Mokodongan

Stambuk : 45 13 042 074

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis/ajukan ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambiln tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terjadi atau ditemukan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala koneksi/sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,

Penulis

Marsa Cikita Mokodongan

ABSTRAK

Marsa Cikita Mokodongan, 2018. “Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Ruang Fasilitas Sosial (Studi Kasus Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat)”. dibimbing oleh Syafrri dan Jufriadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan fasilitas social di Kelurahan Molinow berdasarkan standar penyediaan sarana/fasilitas dan untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan fasilitas social berdasarkan persepsi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang digunakan secara kuantitatif yaitu menggunakan alat analisis *Bunga Berganda* untuk mengetahui kebutuhan fasilitas social sesuai dengan standar pelayanan minimal. Analisis data yang digunakan secara kualitatif yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif

Dari hasil penelitian ini menunjukkan kebutuhan fasilitas social terbanyak pada aspek kebutuhan fasilitas Pendidikan dan fasilitas olahraga ruang terbuka hijau (RTH) Sedangkan kebutuhan fasilitas social berdasarkan persepsi masyarakat yaitu fasilitas olahraga taman, ruang terbuka hijau (RTH), dan kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat.

Kata kunci : kebutuhan dan ketesediaan fasilitas sosial di Kelurahan Molinow

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' Alaikum Wr. Wb

Teriring Rasa Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita curahkan atas segala limpahan Rahmat Karunia serta Hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Kebutuhan Dan Ketersediaan Ruang Fasilitas Sosial (Studi Kasus Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat)”**. Tugas akhir ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana STRATA SATU (S-1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar dan merupakan salah satu proses akhir dari kegiatan pembelajaran di Universitas pada umumnya dan Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Pada khususnya.

Penulis menyadari telah sepenuhnya mengerahkan segala kemampuan dan usaha, namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan lupa serta keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, masih banyak terdapat kekurangan dari tugas akhir ini.

Oleh karenanya, dengan rasa tulus dan ikhlas, selayaknyalah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT Maha Pemberi segalanya atas rahmat, karunia dan kemudahan yang diberikan kepada penyusun.
2. Ibu Dr. Hamsina, ST., M.Si. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

3. Bapak Ir. Jufriadi, ST., M.SP., selaku ketua jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak DR.Ir. Syafri, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Ir. Jufriadi, ST., M.Sp selaku Pembimbing II. Yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Kemudian penyampaian terkhusus dari hati yang paling dalam baik yang tersirat maupun yang tersurat ku haturkan dari lisan sederhana yang terkemas dalam huruf aksara sederhana untuk kedua orang yang tak akan mungkin tergantikan ialah ayah dan ibu tercinta. ayahanda Husrin Mokodongan dan Ibunda Nova Mokoginta.
6. Teman-teman Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Bosowa 'Makassar, terkhusus Kawan – Kawan Seperjuanganku Angkatan 2013 dan seluruh kawan kawanku yang akan aku rindukan kelak nanti.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga ALLAH SWT senantiasa mencurahkan segala keberkahan dan rahmatnya kepada mereka yang telah luar biasa membantu penulis dalam menyelesaikan study ini, amin. Terimakasih.

Makassar,

Marsa Cikita Mokodongan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	9
	A. Pengertian Fasilitas Sosial.....	9
	1.Fasilitas Pendidikan.....	11
	2. Fasilitas Kesehatan.....	17
	3. Fasilitas Peribadatan.....	26
	4. Fasilitas Olahraga dan Taman Rekreasi/RTH.....	28
	B. Persepsi Masyarakat	29
	1. Pengertian Persepsi	29
	2. Proses Pembentukan Persepsi.....	33
	3. Partisipasi Masyarakat	34
	C. Karakteristik Penilaian Kebutuhan Fasilitas Sosial Berdasarkan Persepsi Masyarakat.....	39
	1. Sebaran/Lokasi Fasilitas	39
	2. Kondisi Fisik Fasilitas	42
	3. Kebutuhan Fasilitas	43
	D. Originalitas Penelitian.....	44
	E. Kerangka Fikir	49

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.	50
B. Jenis Data dan Sumber Data.	51
C. Metode Pengumpulan Data	51
D. Populasi dan Sampel.	53
E. Variabel Penelitian	55
F. Metode Analisis Data	55
G. Definisi Operasional.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Gambaran Umum Kecamatan Kotamobagu Barat.....	64
1. Aspek Fisik Dasar.....	64
2. Potensi Sumberdaya Alam.....	68
B. Gambaran Umum Kelurahan Molinow.....	72
1. Aspek Fisik Dasar.....	72
2. Potensi Sumberdaya Alam.....	76
3. Potensi Sumberdaya Manusia.....	76
4. Potensi Sumberdaya Buatan.....	77
C. Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Fasilitas Sosial di Kelurahan Molinow.....	83

1. Fasilitas Pendidikan.....	84
2. Fasilitas Kesehatan.....	85
3. Fasilitas Peribadatan.....	86
4. Fasilitas Olahraga dan RTH.....	87
D. Analisis Kebutuhan Fasilitas Sosial di Kelurahan Molinow Berdasarkan Persepsi Masyarakat.....	89
E. Rekapitulasi dan Sinkronisasi Kebutuhan Fasilitas Sosial Berdasarkan NSPK dan Persepsi Masyarakat.....	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Originalitas Penelitian	44
Tabel 3.1.	Variabel dan Indikator	55
Tabel 3.2.	Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Pendidikan	56
Tabel 3.3.	Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Kesehatan	57
Tabel 3.4.	Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Peribadatan	58
Tabel 3.5.	Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Olahraga dan Ruang Terbuka	59
Tabel 4.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Kotamobagu Barat	65
Tabel 4.2.	Kondisi Topografi Kecamatan Kotamobagu Barat	67
Tabel 4.3.	Kodisi Hidrologi Kecamatan Kotamobagu Barat	68
Tabel 4.4.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Kotamobagu Barat	69
Tabel 4.5.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Rasio Di Kecamatan Kotamobagu Barat	71

Tabel 4.6.	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat	79
Tabel 4.7.	Jumlah Menurut Tingkat Kesehatan di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat	80
Tabel 4.8.	Jumlah Menurut Tingkat Peribadatan di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat	82
Tabel 4.9.	Angka Tahun Dasar Jumlah Penduduk Kelurahan Molinow	83
Tabel 4.10.	Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Molinow	84
Tabel 4.11.	Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Kesehatan	85
Tabel 4.12.	Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Molinow	85
Tabel 4.13.	Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Peribadatan	86
Tabel 4.14.	Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Peribadatan di Kelurahan Molinow	86
Tabel 4.15.	Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Olahraga dan Rekreasi/RTH	87
Tabel 4.16.	Standar Kebutuhan Pelayanan Minimum Fasilitas Olahraga/RTH di Kelurahan Molinow	88

Tabel 4.17.	Jumlah Kebutuhan Fasilitas Sosial Pendidikan Berdasarkan Persepsi Masyarakat	89
Tabel 4.18.	Jumlah Kebutuhan Fasilitas Sosial Kesehatan Berdasarkan Persepsi Masyarakat	90
Tabel 4.19.	Jumlah Kebutuhan Fasilitas Sosial peribadatan Berdasarkan Persepsi Masyarakat	91
Tabel 4.20.	Jumlah Kebutuhan Fasilitas Sosial Berdasarkan Persepsi Masyarakat	91
Tabel 4.21.	Sinkronisasi Kebutuhan Fasilitas Sosial Pendidikan	93
Tabel 4.22.	Sinkronisasi Kebutuhan Fasilitas Sosial Pendidikan	95
Tabel 4.23.	Sinkronisasi Kebutuhan Fasilitas Sosial Peribadatan	97
Tabel 4.24.	Sinkronisasi Kebutuhan Fasilitas Sosial Taman Olahraga	99

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Kotamobagu Barat	65
Grafik 4.2.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Kotamobagu Barat	70
Grafik 4.3.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Rasio Di Kecamatan Kotamobagu Barat	71
Grafik 4.4.	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat	79
Grafik 4.5.	Jumlah Menurut Tingkat Kesehatan di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat	81
Grafik 4.6.	Jumlah Menurut Tingkat Peribadatan di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Kondisi Fasilitas Pendidikan	84
Gambar 4.2.	Kondisi Fasilitas Kesehatan	85
Gambar 4.3.	Kondisi Fasilitas Peribadatan	86
Gambar 4.4.	Kondisi Fasilitas Taman	88
Gambar 4.5	Kondisi Fasilitas Lapangan Sepak Bola	88
Gambar 4.6	Kondisi Fasilitas Lapangan Bola Volly	88
Gambar 4.7	Kondisi Fasilitas Taman Bermain	88

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Pembangunan suatu wilayah pada umumnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, indikator utama dalam pembangunan wilayah yaitu pengadaan fasilitas maupun utilitas wilayah guna mendukung setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat tiap harinya.

Fasilitas sosial merupakan suatu tempat penunjang dan kebutuhan utama yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup sehari-hari di sebuah wilayah tertentu. Pembangunan fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, juga perdagangan dan jasa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara kelompok serta masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah/kota. Fasilitas sebagai suatu tempat

atau media untuk melakukan dan mempermudah kegiatan masyarakat yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat berdasarkan kebutuhan maupun persepsi masyarakat guna mengetahui peruntukan berdasarkan keilmuan manusia itu sendiri.

Pembangunan wilayah sebagian besar hanya terfokus pada kawasan pembangunan ekonomi wilayah semata dengan usaha untuk mengelola sumber daya alam (SDA) yang ada dan bukan menekankan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan demikian masyarakat setempat hanya menjadi penonton, tidak ikut terlibat secara aktif dan representatif atau terwakilnya dalam proses implementasi pembangunan (*Rahminah, 2015*). Pengadaan sarana prasarana secara terpusat sering kurang mencerminkan kebutuhan setempat dan sering kurang dimanfaatkan dan dipelihara oleh pemerintah setempat daerah dan masyarakat setempat. Hal itu juga dapat dilihat dalam pengembangan fasilitas dan utilitas yang sering ditemui yaitu pemerataan pembangunan yang kurang di daerah pinggiran ataupun daerah perbatasan yang menjadi daerah yang terpinggirkan (marginal). Masyarakat sebagai objek dalam pembangunan wilayah harus ikut terlibat dalam proses pembangunan wilayah guna menyamakan persepsi antar masyarakat sebagai objek dan pemerintah sebagai pelaku pengembangan (*stakeholder*)

sehingga dalam pengembangan wilayah dapat tercapai berdasarkan tujuan yang dikehendaki, hal ini lebih dikenal dengan pendekatan *bottom up* dimana pembangunan suatu wilayah melibatkan masyarakat dalam melakukan pembangunan wilayah sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam proses pembangunan karena melibatkan berbagai aspek masyarakat.

Kota kotamobagu merupakan salah satu kota yang sedang melakukan pengembangan infrastruktur khususnya di kawasan perkotaan guna menciptakan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow. Kawasan Perkotaan Kotamobagu Barat yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan wilayah Kota Kotamobagu secara administratif meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kotamobagu utara, sebagian Kecamatan timur, sebagian Kecamatan Kotamobagu selatan dan sebagian Kecamatan Kotamobagu barat. Kecamatan Kotamobagu barat sebagai salah satu wilayah perkotaan Kabupaten Bolaang mongondow dan hanya sebagian kecil wilayah Kecamatan Kotamobagu barat yang menjadi kawasan perkotaan Kotamobagu dan sebagian kawasan lain menjadi kawasan pengembangan, sebagaimana salah satunya yaitu Kelurahan Molinow yang menjadi kawasan Pengembangan perkotaan yang semakin berkembang dan memadai di kawasan perkotaan Kotamobagu dikarenakan

perkembangan penduduk perkotaan yang terus meningkat sehingga permintaan dan kebutuhan aspek infrastruktur juga meningkat. Berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Kotamobagu barat terjadi perkembangan penduduk tiap tahun dimana pertambahan penduduk tahun 2013-2016 sebanyak 329 jiwa, dengan jumlah penduduk yang meningkat akan mengakibatkan perluasan kawasan perkotaan dikarenakan kebutuhan lahan yang juga akan meningkat begitupun dengan kebutuhan fasilitas sosial guna mendukung kegiatan penduduk. Isu permasalahan lain yaitu jarak akses ke pusat-pusat pelayan sosial lainnya yang ada di Kota Kotamobagu menjadi salah satu kendala dan menjadi pertimbangan penduduk Kecamatan Kotamobagu barat untuk melakukan pergerakan ke ibukota kabupaten sehingga perlu adanya pengembangan infrastruktur khususnya fasilitas sosial. Berdasarkan pengamatan dari jumlah penduduk tahun 2016 ketersediaan fasilitas sosial yang ada di Perkotaan Kotamobagu sesuai dan cukup melayani masyarakat namun berdasarkan persepsi kebutuhan masyarakat perlu diketahui karena dalam perencanaan dan pengadaan fasilitas keterlibatan masyarakat sebagai salah satu partisipasi yang sangat dibutuhkan guna mengembangkan suatu wilayah yang berlandaskan pemerataan pembangunan dalam hal ini masyarakat mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu

proses, dan proses yang dimaksud disini tentunya adalah pembangunan untuk mencapai tujuan berdasarkan kebutuhan antar sesama masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangatlah menentukan kualitas dan kebutuhan suatu perencanaan pembangunan fasilitas sosial, maka tujuan penelitian ini disusun untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial berdasarkan standarisasi penyediaan fasilitas sosial dan persepsi masyarakat untuk mengetahui kebutuhan fasilitas yang diperlukan.

Sehubungan dengan itu maka penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas Sosial di Kota Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kawasan Perkotaan Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana kebutuhan fasilitas sosial di Kelurahan Molinow berdasarkan standar penyediaan sarana/fasilitas?
2. Bagaimana ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial berdasarkan persepsi masyarakat?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kebutuhan fasilitas sosial di Kelurahan Molinow berdasarkan standar penyediaan sarana/fasilitas
2. Untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial berdasarkan persepsi masyarakat.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan masukan dan informasi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal pengembangan maupun pembangunan fasilitas sosial di Kelurahan Molinow.
2. Menjadi bahan kajian (referensi) bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan fasilitas sosial berdasarkan persepsi masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang digunakan dalam studi ini meliputi ruang lingkup kawasan penelitian dan ruang lingkup materi penelitian. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi materi pembahasan.

1. Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Kotamobagu barat Kabupaten Bolaang mongondow yang difokuskan di Kelurahan Molinow sebagai Kawasan pengembangan perkotaan.

2. Ruang Lingkup Subtansi

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial di Perkotaan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu barat (Kelurahan Molinow) Kabupaten Bolaang mongondow. Adapun lingkup kajian dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas sosial yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan dan fasilitas olahraga/taman rekreasi (RTH).
- b. Mengidentifikasi persepsi/pendapat masyarakat mengenai tingkat pelayanan dan tingkat ketersediaan fasilitas sosial di Kelurahan Molinow.
- c. Mengkaji dan menganalisis ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial di Kelurahan Molinow berdasarkan persepsi masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, maka dibuat susunan kajian berdasarkan metodologinya dalam bentuk sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang studi, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi dan berkaitan dengan kepentingan analisis studi, terutama yang berisikan tentang materi-materi fasilitas sosial dan kajian persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas sosial wilayah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodeologi penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, variable penelitian, metode analisis data, definisi operasional dan kerangka pikir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Fasilitas Sosial

Fasilitasi berasal dari kata Perancis *facile*, artinya mudah. Kata mudah ini menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas performa karena ditonton oleh kelompok. Kelompok mempengaruhi kualitas performa sehingga terasa lebih mudah dilakukan (Rahmat, 2012).

Menurut Prof. Dr. Hj. Zakiah Darajat fasilitas artinya segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut David G. Myers arti yang sebenarnya dari Fasilitas sosial adalah kecenderungan bagi seseorang untuk menampilkan tugas-tugas yang sederhana atau telah dipelajari dengan baik dan menampilkan secara lebih baik ketika orang lain berada diantara mereka. Sebetulnya jika kita telaah lebih jauh lagi Fasilitas sosial bukan menjadi istilah yang tepat dipandang dari beberapa hal, sebab kehadiran suatu kelompok malah menjadi penghambat sebuah performa atau kinerja. Istilah ini mungkin tepat digunakan pada penelitian-penelitian awal Psikologi sosial yang berkenaan dengan fasilitas sosial. (Triplett, 1897) menunjukkan bagaimana

prestasi anak-anak meningkat ketika pekerjaan mereka dilakukan dihadapan kelompok.

Floyd Allport menemukan bahwa fasilitas sosial tidak selalu memudahkan pekerjaan. Dia dibingungkan oleh adanya banyak orang yang secara konstan mengalami penurunan prestasi bila bekerja ditengah-tengah kelompok.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, fasilitas adalah sarana yang menunjang atau melancarkan suatu usaha atau kegiatan. Definisi fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu (Sam, 2012).

Menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 tahun 1987, tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial, termuat definisi fasilitas sosial yaitu fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi: fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekreasi dan budaya, olahraga dan taman bermain, pemerintah dan pelayanan umum serta pemakaman umum.¹

Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial

kemasyarakatan dan merupakan fasilitas yang digunakan orang banyak atau dalam kata lain fasilitas yang diperuntukan bersama. Fasilitas sosial disini dapat berupa rumah sakit, sekolah, jalan, mall, pasar, angkutan umum dll. Berikut fasilitas yang termasuk dalam fasilitas sosial yaitu:

1. Fasilitas Pendidikan

Dalam khazanah peristilahan pendidikan sering disebut-sebut istilah sarana dan prasarana pendidikan. Kerap kali istilah itu digabung begitu saja menjadi sarana-prasarana pendidikan. Dalam bahasa Inggris sarana dan prasarana itu disebut dengan *facility* (*facilities*). Jadi, sarana dan prasarana pendidikan akan disebut *educational facilities*. Sebutan itu jika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan artinya segala sesuatu (alat dan barang) yang memfasilitasi (memberikan kemudahan) dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

Penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (kelurahan, kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut.

Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentuk grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:

- a) berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
- b) optimasi daya tampung dengan satu shift;
- c) efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- d) pemakaian sarana dan prasarana pendukung;

e) keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dapat mengembangkan serta meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Fasilitas pendidikan meliputi sekolah (TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi). Pendidikan merupakan factor penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dapat memicu percepatan pembangunan di suatu wilayah.

Sekolah merupakan fasilitas sosial dimana masyarakat dapat menggunakan untuk melakukan aktifitas belajar mengajar guna menciptakan masyarakat yang terpelajar dan berpendidikan,. Kata sekolah berasal dari bahasa latin, yakni *skhole*, *scola*, *scolae* atau *skhola* yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang bagi masyarakat khususnya anak-anak ditengah kegiatan utama mereka, yakni bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Menurut KBBI sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran.

Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa (murid) dibawah pengawasan pendidik (guru). Di Indonesia

seorang anak menempuh pendidikan sekolah secara berjenjang, mulai dari SD (sekolah dasar), SMP (sekolah menengah pertama), SMA (sekolah menengah atas) dan perguruan tinggi. Dan juga terdapat sekolah tingkat paling dasar untuk anak usia dini yang lebih dikenal PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TK (Taman Kanak-Kanak). Sistem pendidikan di setiap negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib. Hal itu dikarenakan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hidup ini guna meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) sehingga fasilitas pendidikan sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pendidikan masyarakat. Di Indonesia terdapat 2 (dua) instansi sekolah yaitu sekolah swasta dan sekolah negeri. Sekolah swasta yaitu sekolah yang dikelola oleh pihak sendiri ataupun suatu lembaga yayasan yang secara keseluruhan sudah menjadi tanggung jawab orang yang mendirikan, sedangkan sekolah negeri yaitu sekolah yang dikelola pihak pemerintah yang secara keseluruhan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Aspek fasilitas dan utilitas di sekolah terdiri dari kondisi bangunan, keadaan ruang kelas. Kenyamanan, infrastruktur kelas yang meliputi (papan tulis, meja, bangku dll), infrastruktur sekolah yang meliputi (lapangan, perpustakaan, WC). Aspek ini merupakan aspek

mendasar dan yang terpenting yang harus mendapat perhatian lebih. Karena suatu sekolah akan dilihat dari aspek fasilitas dan utilitasnya yang cukup memadai dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Berikut jenis-jenis fasilitas pendidikan yaitu:

Menurut tingkatannya, sekolah dibedakan menjadi 4 tingkat:

- a. Pendidikan pra-sekolah: adalah pendidikan sebelum sekolah dasar, meliputi Kelompok Bermain (*play group*).
- b. Pendidikan dasar: meliputi sekolah dasar/madrasah Ibtidaiyah dan SLTP/MTs.
- c. Pendidikan menengah: meliputi SLTA dan kejuruan atau Madrasah Aliyah.
- d. Pendidikan tinggi: meliputi akademi, institusi, sekolah tinggi dan universitas.

Menurut sifatnya, sekolah dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Sekolah umum: yaitu sekolah yang belum mempersiapkan anak dalam spesialisasi pada bidang pekerjaan tertentu. Misalnya SD, SLTP dan SLTA.
- b. Sekolah khusus: yaitu lembaga pendidikan sekolah yang mempersiapkan anak untuk menguasai keahlian-keahlian tertentu. Misalnya: SMEA, MAK. SMK dan STM.

Berikut jenis-jenis sekolah yang ada di Indonesia:

a. SD (Sekolah Dasar)

SD (sekolah dasar) merupakan jenjang terendah dalam pendidikan di Indonesia. Ditingkat SD ini, seorang anak wajib belajar selama 6 tahun. Saat ini murid SD harus mengikuti Ujian Nasional agar dapat melanjutkan ke jenjang SMP (sekolah menengah pertama). Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 6-12 tahun. Sekolah dasar (SD) dilaksanakan dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.

b. SMP (Sekolah Menengah Pertama)

SMP (sekolah menengah pertama) merupakan jenjang berikutnya setelah jenjang SD. Dijenjang SMP ini. Seorang anak wajib belajar selama 3 tahun. Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun.

c. SMA (Sekolah Menengah Atas)

SMA (sekolah menengah atas) merupakan jenjang berikutnya setelah jenjang SMP. Seorang anak wajib belajar selama 3 tahun di SMA. Pada jenjang ini siswa sudah bisa memilih jurusan berdasarkan kemampuan dan minat siswa yaitu jurusan sains, sosial atau bahasa.

d. Perguruan tinggi

Perguruan tinggi merupakan suatu tempat penyelenggara pendidikan bagi mereka yang sudah lulus SMA. Perguruan tinggi di Indonesia 2 instansi yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri merupakan perguruan yang dikelola oleh pihak pemerintah, sedangkan perguruan tinggi swasta merupakan perguruan yang dikelola oleh pribadi maupun oleh suatu yayasan tertentu.

2. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan dalam rangka menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan orang-perorangan, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat umum. Fasilitas kesehatan yaitu salah satu fasilitas yang diadakan pemerintah kota. Kesehatan merupakan aspek penting yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Berikut jenis fasilitas kesehatan:

a. Rumah Sakit

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah sakit

adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian (Depkes RI, 1994 : 2).

Rumah sakit adalah suatu organisasi kompleks yang menggunakan Perpaduan peralatan ilmiah yang rumit dan khusus, yang difungsikan oleh kelompok tenaga terlatih dan terdidik dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pengetahuan medic modern untuk tujuan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.

Rumah Sakit menurut WHO (1957) diberikan batasan yaitu "suatu bagian yang menyeluruh lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitative dimana output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biososial".

Rumah Sakit menurut Menteri Kesehatan RI No. 983/Menkes/per/II/1992 yaitu "sarana upaya kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian." (*Hand Book of Instutionl Parmacy Pratices*).

Berikut tipe-tipe rumah sakit:

1) Rumah Sakit Tipe-A

Rumah sakit tipe-A adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspecialis luas. Oleh pemerintah, RS tipe-A ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi (*Top Refetral Hospital*).

2) Rumah Sakit Tipe-B

Rumah sakit tipe-B adalah RS yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis luas dan subspecialis terbatas. Direncanakan RS tipe-B didirikan disetiap ibukota Propinsi (*Provincial Hospital*) yang menampung pelayanan rujukan RS Kabupaten.

3) Rumah Sakit Tipe-C

Rumah Sakit Tipe-C adalah RS yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Pada saat ini ada empat macam pelayanan spesialis yang disediakan yaitu pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak serta pelayanan kebidanan dan kandungan.

4) Rumah Sakit Tipe-D

Rumah sakit tipe-D adalah RS yang bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi RS tipe-C. Pada saat ini kemampuan RS tipe-D hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi.

5) Rumah Sakit Tipe-E

Rumah sakit tipe-E adalah RS khusus (*special hospital*) yang menyelenggarakan hanya satu macam pelayanan kedokteran saja (Azwar, 1996 : 89-90).

b. Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas adalah Organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.

c. Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.

d. Posyandu

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat, dimana masyarakat dapat sekaligus memperoleh pelayanan profesional oleh petugas sektor, serta non profesional (oleh kader) dan diselenggarakan atas usaha masyarakat sendiri. Posyandu dapat dikembangkan dari pos pengembangan balita, pos imunisasi, pos KB, pos kesehatan. Pelayanan yang diberikan posyandu meliputi: KB, KIA, gizi, imunisasi dan penanggulangan diare serta kegiatan sektor lain.

e. Balai Pengobatan

Balai pengobatan umum merupakan salah satu dari jenis-jenis layanan di puskesmas yang merupakan tempat untuk melayani pemeriksaan umum oleh dokter, yang meliputi

observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitas medik tanpa tinggal diruangan inap pada sarana kesehatan puskesmas (Sulaeman, Endang Sutrisno, 2011). Balai pengobatan umum memberikan pelayanan kesehatan terutama pengobatan dan penyuluhan kepada pasien agar tidak terjadi penularan dan komplikasi penyakit. Serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan.

Balai pengobatan merupakan unit pelaksana yang menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat lanjutan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik.

f. BKIA/RS Bersalin

BKIA (Badan Kesehatan Ibu dan Anak) adalah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada wanita hamil, wanita menyusukan, wanita dalam masa nifas, bayi, anak balita/prasekolah, dan pelayanan Keluarga Berencana.

Rumah Bersalin merupakan tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin, dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir (peraturan Daerah

Kota Malang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal I, no 14).

Rumah Bersalin mempunyai sifat privat dan semi privat, sebab tidak semua orang dapat keluar masuk di dalam area ini. Sifat privat terdapat pada ruang persalinan.

g. Apotek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Menurut Keputusan Menkes RI No.1332/Menkes/SK/X/2002 Apotek merupakan suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat.

Apotek memiliki tugas dan fungsi sebagai

- 1) Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan
- 2) Sarana farmasi untuk melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat.
- 3) Sarana penyaluran perbekalan farmasi dalam menyebarkan obat – obatan yang diperlukan masyarakat secara luas dan merata.

Berdasarkan SNI S03-1733-2004 *Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota*. Fasilitas kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentuk grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan

mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Adapun fungsi fasilitas kesehatan sebagai berikut:

- a) Posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
- b) Balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*curative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- c) Balai kesejahteraan ibu dan anak (bkia) / klinik bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
- d) Puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
- e) Puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan

pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;

- f) Tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- g) Apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

3. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan adalah fasilitas pelayanan peribadatan yang dapat digunakan dalam rangka melakukan aktifitas beribadah masyarakat. Sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Fasilitas peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun baru dapat dipastikan setelah

lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu. Pendekatan perencanaan yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius. Jenis fasilitas peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya. Berikut jenis-jenis fasilitas peribadatan:

a. Masjid

Masjid adalah tempat ibadah umat muslim. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga terkadang dimanfaatkan umat muslim untuk melakukan pertemuan, pengajian ataupun perayaan hari-hari besar bersejarah bagi para umat muslim. Masjid adalah rumah ibadah umat muslim, masjid berukuran kecil juga disebut musholla, langgar atau surau.

b. Gereja

Gereja adalah tempat ibadah umat kristiani. Biasanya umat kristiani beribadah ke gereja pada hari minggu untuk memanjatkan doa'a.

c. Pura

Pura adalah tempat ibadah umat beragama Hindu.

d. Vihara

Vihara adalah tempat ibadah umat beragama Budha.

4. Fasilitas Olahraga dan Taman Rekreasi (RTH).

Fasilitas Olahraga adalah suatu bentuk yang permanen, bisa digunakan didalan ruangan ataupun diluar ruangan untuk melakukan kegiatan olahraga. Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan. Taman rekreasi adalah suatu lahan digunakan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang serta tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air,

hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas, dimana taman disini gunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan bermain, olahraga, berinteraksi antar sesama masyarakat. Kegiatan rekreasi dibedakan menjadi kegiatan yang bersifat aktif dan pasif. Kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olah raga, permainan, dan sebagainya melalui penyediaan sarana-sarana permainan.

B. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Kartono dan Gulo, 1987 dalam Adrianto, 2006).

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke

otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan (Davidoff, 1980 dalam Adrianto, 2006).

Menurut Saptorini (1989), persepsi adalah suatu proses mental yang rumit dan melibatkan berbagai kegiatan untuk mnggolongkan stimulus yang masuk sehingga nebhasilkan tanggapan untuk memahami stimulus tersebut. Persepsi dapat terbentuk setelah melalui kegiatan, yakni proses fisik (penginderaan), fisiologis (pengiriman hasil penginderaan ke otak melalui saraf sensoris) dan psikologis (ingatan, perhatian, pemrosesan informasi di otak). Beberapa hal yang mempengaruhi persepsi:

- a. Pelaku persepsi, bila seorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik karakteristik pribadi dari pelaku persepsi, antara lain sikap, motif/kebutuhan individu, suasana hati, pengalaman masa lalu, prestasi belajar sebelumnya dan pengharapan.

- b. Target yang akan diamati, karakteristiknya dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan.
- c. Situasi, yaitu unsur-unsur dalam lingkungan sekitar dapat mempengaruhi persepsi (Robins, 1996).

Persepsi adalah proses yang digunakan individu dalam mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka, meskipun demikian apa yang dipersiapkan seseorang dapat berbeda kenyataan obyektif (Herminta, 2008).

Menurut Fajar (2009) Persepsi didefinisikan sebagai interpretasi terhadap berbagai sensasi sebagai representasi dari obyek-obyek eksternal". Untuk itu bisa dijelaskan bahwa persepsi merupakan pengetahuan tentang apa yang didapatkan ditangkap oleh panca indera.

Fajar (2009) menjelaskan bahwa suatu tindakan persepsi mensyaratkan kehadiran obyek eksternal untuk dapat ditangkap oleh indera. Dalam hal perspektif terhadap diri pribadi, kehadirannya jelas dapat dirasakan. Selain itu persepsi juga timbul karena adanya informasi untuk diinterpretasikan. Informasi yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui sensasi indera.

Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut *society* asal katanya *socius* yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus, bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sedangkan jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial.

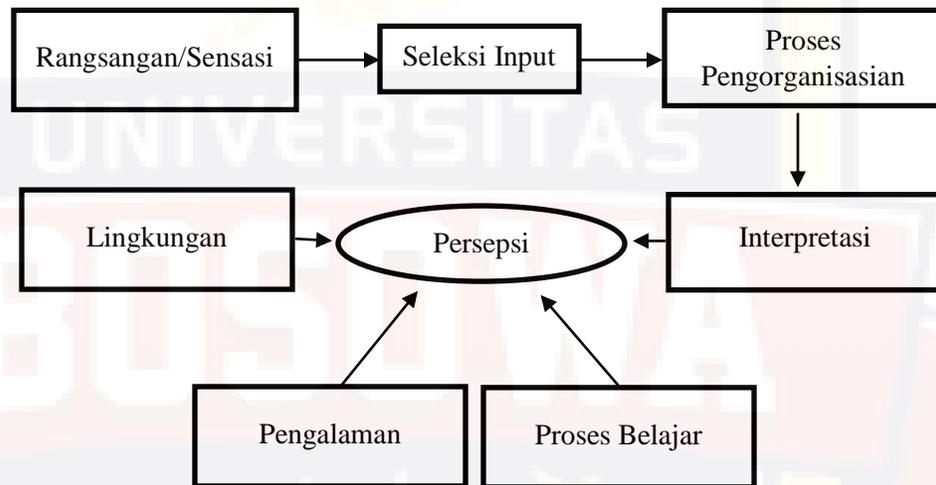
Pakar sosiologi seperti Mac Iver, J.L Gillin memberikan pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama (Musadun, 2000 dalam Adrianto, 2006).

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinyu

dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

2. Proses Pembentukan Persepsi

Damayanti (2000) dalam Prasilika, Tiara H. (2007:12-13) menggambarkan proses pembentukan persepsi pada skema dibawah ini:



Gambar 2.1 Skema Pembentukan Persepsi

Proses pembentukan persepsi dimulai dengan penerimaan rangsangan dari berbagai sumber melalui panca indera yang dimiliki, setelah itu diberikan respon sesuai dengan penilaian dan pemberian arti terhadap rangsang lain. Setelah diterima rangsangan atau data yang diseleksi. Untuk menghemat perhatian yang digunakan rangsangann-rangsangan yang tela diterima diseleksi lagi untuk diproses pada tahap yang lebih lanjut. Setelah diseleksi lagi untuk diproses pada tahap yang lebih lanjut. Setelah

diseleksi rangsangan diorganisasikan berdasarkan bentuk sesuai dengan rangsangan yang telah diterima. Setelah data diterima dan diatur, proses selanjutnya individu menafsirkan data yang diterima dengan berbagai cara. Hal ini dikatakan telah terjadi persepsi setelah data atau rangsangan tersebut berhasil ditafsirkan.

Sedangkan factor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang dapat disebut sebagai factor-faktor personal, yang menentukan persepsi respon terhadap stimuli (Rakhma, 1998). Sejalan dengan hal tersebut, maka persepsi seseorang ditentukan oleh dua factor utama yaitu pengalaman masa lalu dan factor pribadi (Sugiharto, 2001).

3. Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi didefinisikan dengan ikut serta atau mengambil bagian. Partisipasi mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses, dan proses yang dimaksud disini tentunya adalah pembangunan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia partisipasi diartikan sebagai ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan; keikutsertaan secara aktif. Berbeda dengan pendapat tersebut dengan pendapat tersebut, Davis dalam Tuny mengemukakan bahwa partisipasi “as

a mental and emotional involvement of person in a group situation which encourages him to contribute group goal and share responsibility in them". Dalam pengertian ini dapat dijabarkan dalam tiga arti pokok yaitu;

- a. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional
- b. Partisipasi menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan
- c. Partisipasi merupakan tanggung jawab terhadap kelompok.

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Davis dan Newstrom dalam Tuny, (2005,15) bahwa partisipasi sebagai keterlibatan mental emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut.

Ada tiga gagasan penting yang terkandung dalam pengertian diatas antara lain;

- a. Keterlibatan; partisipasi berarti adanya keterlibatan mental dan emosional dan bukan saja aktifitas fisik. Keterlibatan ini bersifat psikologis, sehingga seseorang yang berperan serta terlibat emosinya dan bukan terlibat karena tugas yang diemban

- b. Kontribusi; motivasi orang-orang yang berpartisipasi adalah dapat memberikan kontribusi. Mereka yang diberikan kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreatifitasnya guna mencapai tujuan organisasi.
- c. Tanggung jawab; bahwa partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggungjawab dalam aktifitas kelompok. Disini terjadi proses sosial, orang-orang yang menjadi terlibat sendiri dalam organisasi pada akhirnya merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Mubyarto dalam Ndraha (1987:102) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengiribankan kepentingan sendiri. Selanjutnya Bryant dan White dalam Ndraha (1987:102) menyebut dua macam partisipasi; partisipasi antar sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horizontal, dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara klien dengan patron, atau antara masyarakat dengan pemerintah yang disebut partisipasi vertical, keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilihan, kampanye dan sebagainya, disebut partisipasi dalam proses politik, sedangkan keterlibatan

dalam kegiatan seperti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administratif. Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok disebut partisipasi individual.

Dalam proses pembangunan daerah yang berlangsung saat ini, tampaknya partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat yang belum menentukan. Mestinya mulai dari awal penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dijadikan titik tolak perencanaan, masyarakat sudah ikut aktif menyampaikan aspirasinya. Partisipasi masyarakat selama ini lebih berupa penyampaian informasi tentang rencana dan program pembangunan yang telah yang telah disusun oleh para pembuat keputusan dan penentu kebijaksanaan (Budihardjo, 2011). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perutusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pembinaan masyarakat.² Kehadiran partisipasi masyarakat saat ini secara efektif menjadi keharusan dalam semua dokumen kebijakan dan proposal-proposal kegiatan dari donor-donor

internasional maupun badan-badan pelaksana. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk pemberdayaan bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Mirsa, 2012). Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam kerja sama antara rakyat dan pemerintah merancang, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan wilayah memiliki nilai dalam mencapai tujuan akhir.

Masyarakat sebagai objek suatu pembangunan wilayah menjadikan masyarakat itu sendiri sebagai pemeran utama dalam pembangunan guna mencapai tujuan yang akan diterapkan sebagai pemerataan serta menyamakan persepsi antar masyarakat dan pemerintah sebagai pelaku pengembangan (*stakeholder*) sehingga dalam pengembangan wilayah dapat tercapai berdasarkan tujuan yang dikehendakikan tidak terjadi kesenjangan dalam proses pembangunan karena melibatkan berbagai aspek masyarakat.

Partisipasi masyarakat terdiri dari tiga tujuan yaitu:

- a. Sebagai sumber informasi dan kebijaksanaan dalam meningkatkan efektivitas keputusan perencanaan,

- b. Sebagai suatu alat untuk mengorganisir persetujuan dan pendukung untuk tujuan program serta perencanaan.
- c. Sebagai suatu cara pembenaran, perlindungan individu dan kelompok.³

Produk rencana tata ruang dapat berhasil dalam pelaksanaannya di lapangan jika masyarakat ikut berpartisipasi dengan baik. Untuk memperoleh dukungan masyarakat maka peran serta masyarakat harus dilibatkan sejak awal perencanaan, penyusunan rencana dilakukan dengan model *bottom up planning* sebagai syarat akan timbulnya partisipasi masyarakat dalam mengelola ruang.

C. Karakteristik Penilaian Kebutuhan Fasilitas Sosial Berdasarkan Persepsi Masyarakat

1. Sebaran/Lokasi Fasilitas

Teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya, dimana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki daya tarik tersebut.

Teori lokasi di dasari oleh faktor-faktor geografis dan keadaan lingkungan. Materi inti dalam geografi adalah “mencoba mengetahui karakteristik dan keunikan ruang serta perubahannya termasuk strukturnya, mendapatkan bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungannya serta secara sistematis menjelaskan interaksi antara lokasi dengan kondisi geografis yang ada”.

Terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006:78). Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut.

Ada dua factor yang sangat berpengaruh di dalam penentuan dan pendistribusian pusat pelayanan/fasilitas yaitu (Sujarto, 1989):

- a. Faktor manusia yang akan mempergunakan pusat-pusat pelayanan tersebut. Faktor manusia ini menyangkut pertimbangan-pertimbangan mengenai jumlah penduduk yang akan mempergunakan pelayanan tersebut, kepadatan penduduk,

perkembangan penduduk, status sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai, potensi masyarakat, pola kebudayaan dan antropologi.

- b. Faktor lingkungan dimana manusia tersebut melaksanakan kegiatan kehidupannya. Ini menyangkut pertimbangan skala lingkungan dalam arti fungsi dan peranan sosial ekonominya, jaringan pergerakan, letak geografis lingkungan dan sifat keterpusatan lingkungan.

Salah satu teori yang mendasari pendistribusian lokasi fasilitas yang memberikan pelayanan berupa jasa, adalah *Central Place Theory* dari seorang ahli geografi, Walter Christaller. Menurut Christaller (1933), pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon (segi enam). Keadaan seperti itu akan terlihat dengan jelas di wilayah yang mempunyai dua syarat: (1) Topografi yang seragam sehingga tidak ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain dalam hubungan dengan jalur pengangkutan dan (2) Kehidupan ekonomi yang homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer, yang menghasilkan padi-padian, kayu atau batu bara. Tetapi pada kenyataannya penduduk tersebar secara tidak merata dan mereka harus memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa dari fasilitas yang tersebar di tempat yang terpisah. Namun, orang cenderung memilih

fasilitas yang paling aksesibel. Yang dimaksud dengan 'paling aksesibel' adalah (Rushton, 1979: 32):

- c. Total jarak yang ditempuh minimum.
- d. Jarak terjauh yang ditempuh adalah minimum.
- e. Jumlah penduduk sekitar fasilitas selalu lebih besar dari jumlah tertentu (misal: pusat perbelanjaan).
- f. Jumlah penduduk sekitar fasilitas selalu lebih kecil dari jumlah tertentu (misal: puskesmas).

2. Kondisi Fisik Fasilitas

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kondisi adalah persyaratan atau keadaan. Kondisi adalah situasi atau keadaan yang ada pada diri individu baik itu di luar maupun di dalam dirinya.

Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaan. Artinya bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut harus berkembang (Sajoto, 1995).

Kondisi fisik fasilitas dapat diartikan kondisi atau keadaan fisik fasilitas yang layak digunakan oleh masyarakat untuk membantu dan mendukung kegiatan masyarakat.

3. Kebutuhan Fasilitas

Teori kebutuhan Maslow adalah teori yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Adapun kebutuhan dasar menurut Maslow yaitu;

- a. Kebutuhan psikologis
- b. Kebutuhan keamanan dan keselamatan
- c. Kebutuhan sosial
- d. Kebutuhan penghargaan
- e. Kebutuhan aktualisasi diri

Kebutuhan fasilitas yang semestinya dapat membantu masyarakat dalam setiap kegiatan sehari-harinya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas baik berdasarkan kapasitas fasilitas yang cukup atau tidak cukup untuk melayani penduduk/masyarakat, kebutuhan berdasarkan sosial penduduk yang ada baik berdasarkan umur maupun agama dan kebutuhan dalam mencapai kenyamanan dan keamanan penduduk dan sebagainya.

D. Originalitas Penelitian

Tabel 2.1 Originalitas Penelitian

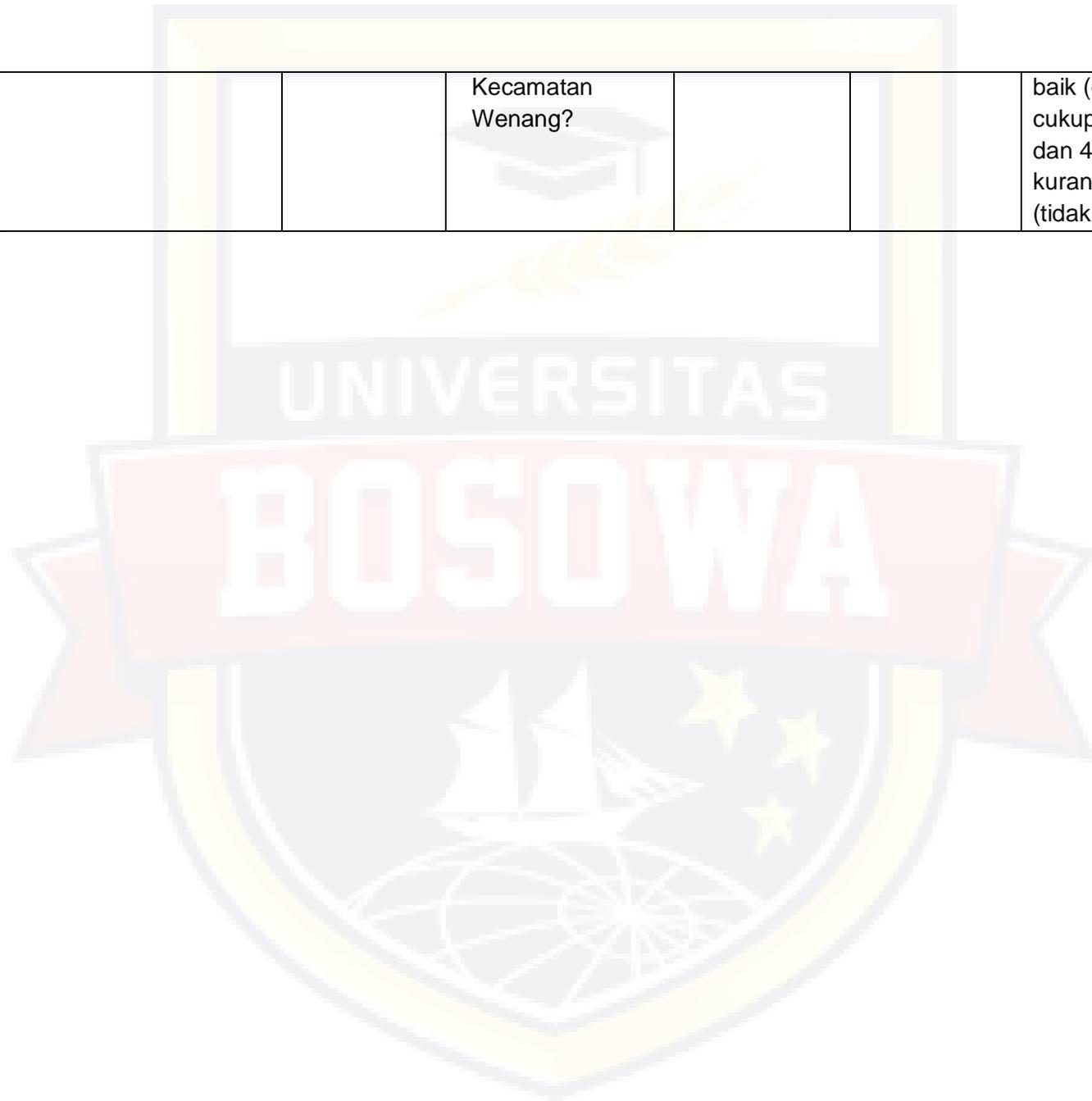
No.	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Variabel	Alat Analisis	Kesimpulan
1.	Kajian Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Perkotaan Subang	Meyliana Lisanti dan Reza M. Surdia	Bagaimana tingkat pelayanan fasilitas sosial berdasarkan persepsi masyarakat di perkotaan subang?	- Fasilitas Sosial - Persepsi Masyarakat	- Kualitatif - Kuantitatif (Standarisasi)	Hasil dari penelitian ini yaitu dapat dilihat kelurahan mana dan fasilitas apa saja yang masih perlu peningkatan pelayanannya, sehingga perlu penambahan dalam upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan fasilitas sosial tersebut agar dapat melayani penduduk dan ketersediaan fasilitas sosial yang ada dapat terjangkau oleh penduduk, sedangkan untuk fasilitas sosial yang berkondisi buruk dapat diperbaiki agar dapat digunakan kembali sehingga tingkat pelayanan fasilitas sosial di Perkotaan Subang menjadi lebih baik.
2.	Analisis Kebutuhan Dan Penempatan Prasarana-	M.Sukri Umasangadji	Bagaimana kebutuhan dan	- Fasilitas Pendidikan	- Kualitatif - Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan proyeksi 2014-

	Sarana Fasilitas Pendidikan Di Kecamatan Wori		penempatan prasarana-sarana fasilitas pendidikan berdasarkan SIG di Kecamatan Wori?	- penempatan - SIG (sistem informasi geografis)	(SNI berdasarkan proyeksi penduduk, overlay)	2030 kebutuhan fasilitas pendidikan memerlukan penambahan 13 unit di beberapa kelurahan. Sedangkan berdasarkan hasil analisis <i>buffer</i> menunjukkan bahwa fasilitas sosial pendidikan di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara diperlukan penambahan 3 unit bangunan sekolah dengan rincian 2 pada pulau dan 1 di daratan.
3.	Analisis Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pada Lingkungan Permukiman	Muhammad Nadjib Massikki	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang ada di Kawasan Pusat Kota Palu?	- Sarana dan Lingkungan yaitu pendidikan, perdagangan, peribadatan, ruang terbuka kota (taman) -Prasarana yaitu MCK, transportasi, air minum, air limbah, persampahan,	- Kualitatif - Kuantitatif (Standarisasi Pelayanan Minimum)	Hasil penelitian ini yaitu ditinjau dari fungsi lahan secara geografis lingkungan permukiman berada dekat dengan kawasan perekonomian kota dengan jasa transportasi yang lancar sehingga perlu perbaikan sarana dan prasarana lingkungan yang ada dan memanfaatkan bangunan-bangunan yang ada serta memperbaiki infrastruktur dasar yang diperlukan.

				listrik, telepon		
4.	Identifikasi Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan Di Urban Fringe Area Kelurahan Pudukpayung	Ajeng Dwi Handayani	<p>1. Bagaimana perubahan pola lahan permukiman?</p> <p>2. Bagaimana ketersediaan, kualitas dan penyebaran sarana prasarana lingkungan permukiman di daerah pinggiran kota Kelurahan Pudukpayung?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana - Ketersediaan - Kualitas - Penyebaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif Kuantitatif - Kuantitatif Skoring (skala likert) - Pemetaan spasial 	<p>Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan analisis pola perubahan lahan permukiman terjadi peningkatan lahan terbangun di Kelurahan Pudukpayung setiap tahunnya. Berdasarkan analisis standarisasi ketersediaan sarana dan prasarana perlu penambahan 11 SD, 2 unit SLTP, 3 unit SLTA, 4 unit taman baca, 8 unit balai pengobatan, 74 unit musholla, dan 6 atau 85 unit taman/tempat bermain. Berdasarkan analisis kualitas sarana dan prasarana perlu dilakukannya peningkatan kualitas dan mutu dari bangunan PAUD/ TK, Posyandu, Balai Pengobatan, Balai Warga, dan Lapangan Olahraga, baik dari sisi fisik dan non fisik. Serta perlu untuk memperhatikan kualitas dan</p>

						<p>mutu dari Jaringan Jalan dan Jaringan Air Bersih yang saat ini masih kurang baik. Perlu adanya perbaikan di hampir semua sisi jalan dan pemerataan untuk sumber air bersih sehingga masyarakat di Kelurahan Pudakpayung sedangkan berdasarkan sebaran saran dan prasarana perlu untuk diperhatikan persebarannya.</p>
	<p>Evaluasi Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Teori Neighborhood Unit (Studi Kasus : Kecamatan Wenang)</p>	<p>Putu Harianja Prayogo, Andy Malik, Amanda Sembel.</p>	<p>1. Bagaimana tingkat pelayanan fasilitas pendidikan yang terdapat di Kecamatan Wenang? 2. Bagaimana jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan berdasarkan pendekatan neighborhood di</p>	<p>- Fasilitas Pendidikan - Pendekatan Neighborhood</p>	<p>- Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Berdasarkan penilaian daya tampung fasilitas pendidikan tingkat SLTP memiliki nilai rata-rata cukup (>110%) hal ini disebabkan kelebihan jumlah kelas yang tidak diimbangi dengan jumlah penduduk usia sekolah SLTP (13-15 Tahun) Sama halnya dengan daya tampung fasilitas pendidikan tingkat SLTA. penilaian tingkat keterisian sekolah tingkat SLTP di Kecamatan Wenang terdapat 3 kelurahan yang</p>

			Kecamatan Wenang?			baik (efisien), 2 kelurahan cukup tingkat keterisiannya dan 4 kelurahan yang masih kurang tingkat keterisiannya (tidak efisien).
--	--	--	----------------------	--	--	--



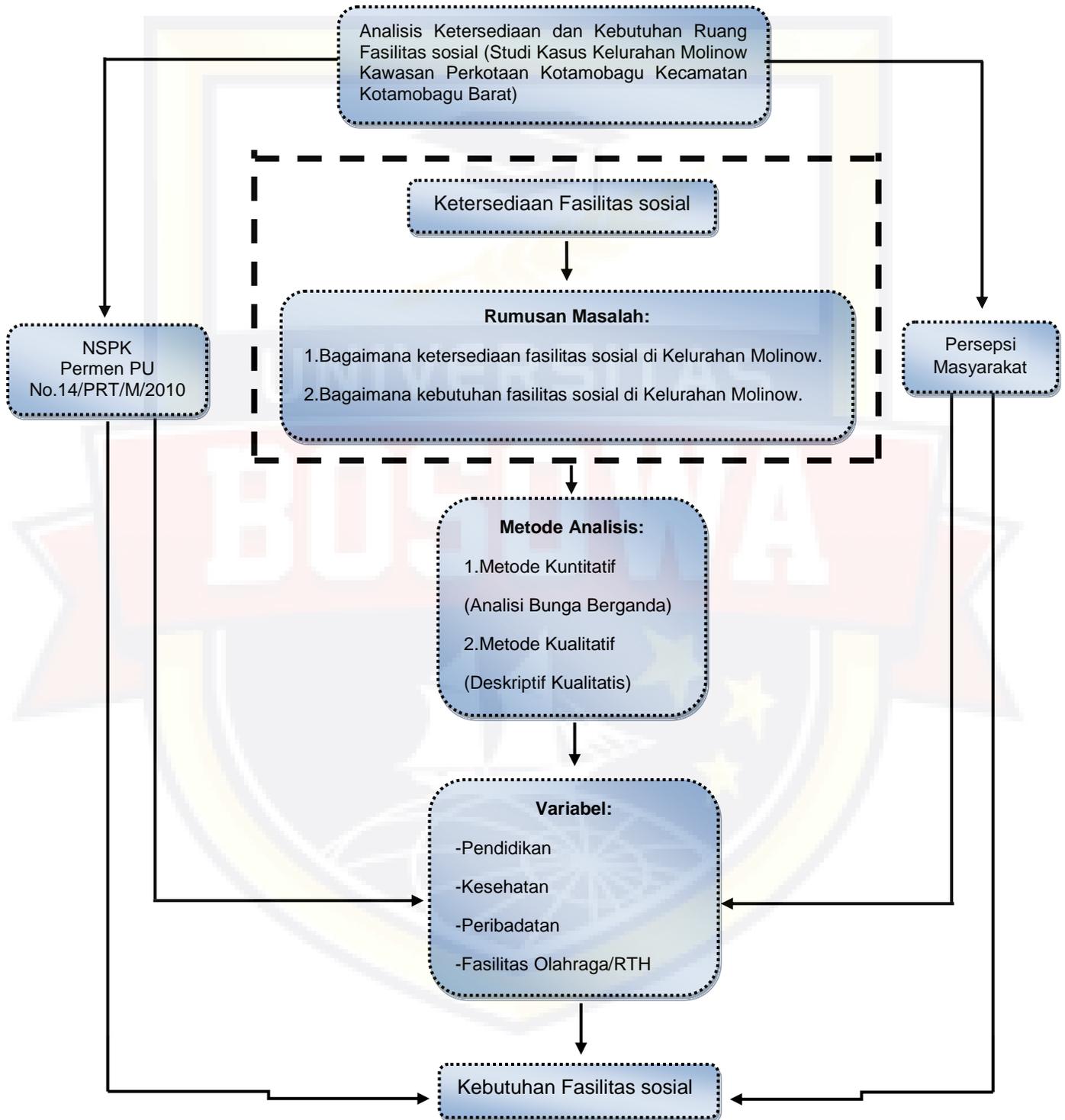
Dari beberapa hasil penelitian diatas, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini, adapun persamaanya yaitu kajian ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial berdasarkan standarisasi dan berdasarkan persepsi masyarakat serta analisis yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan standarisasi pelayanan fasilitas, sedangkan perbedaan antara penelitian diatas yaitu perbedaan pendekatan.

UNIVERSITAS

BOSOWA



E. Kerangka Fikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Molinow di Kecamatan Kotamobagu Barat, dengan jarak 5 - 7 km dari pusat Kota Kotamobagu dengan luas wilayah Kelurahan Molinow yaitu 3,83 km².

Adapun batas wilayah Kelurahan Molinow sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mogolaing
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mogolaing.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Motoboi kecil dan Kelurahan Pobundayan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mogolaing.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan berdasarkan lama waktu kegiatan penelitian dimulai dari melakukan pembuatan proposal, melakukan penelitian, kegiatan survey lapangan, pengumpulan data penelitian, sampai dengan perampungan hasil penelitian dan proses kegiatan penyelesaian penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 juli sampai selesai.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam studi ini data dan informasi yang relevan dan lengkap, adapun jenis data terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan kondisi dan ketersediaan fasilitas sosial yang ada berdasarkan kondisi lapangan dan hasil wawancara dengan masyarakat setempat.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh pada instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif objek penelitian, dimana data ini bersumber dari beberapa instansi terkait baik dalam bentuk tabulasi maupun deskriptif. Jenis data yang dibutuhkan mencakup data letak geografi wilayah, jumlah penduduk, luas wilayah, sarana dan prasarana wilayah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode pengumpulan data primer yaitu:
 - a. Observasi, berfungsi untuk pencarian data dengan mengidentifikasi data melalui pengukuran serta pengambilan data secara langsung di lapangan. Kegiatan observasi dilakukan secara sistematis untuk menajaki masalah dalam penelitian serta bersifat eksplorasi.

Observasi dilakukan berupa pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap kondisi fisik dan ketersediaan fasilitas sosial di wilayah penelitian,

- b. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data sekunder atau dokumentasi dengan mengambil data-data dalam bentuk visual tentang kondisi lapangan.
- d. Kuisisioner yaitu mengumpulkan data melalui penyebaran angket kepada responden untuk mendapatkan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang telah disediakan. Adapun yang menjadi informan/responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kelurahan Molinow.

- 2. Metode pengumpulan data sekunder yaitu telah pustaka adalah cara mengumpulkan data informasi dengan cara membaca atau mengambil data yang sifatnya dokumen dan literature pada dinas terkait atau buku-buku yang mampu mendukung penelitian.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena, atau konsep yang menjadi pusat perhatian. Adapun populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat yang ada di Kelurahan Molinow 6,123 jiwa.

2. Sampel

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih/diambil dari suatu populasi. Besar sampel ditentukan oleh banyaknya data atau observasi dalam sampel ini. Berdasarkan populasi diatas maka teknik penarikan sampel dilakukan secara acak (sampel random). Untuk referensi penelitian ini maka sampel ditetapkan secara proporsional dengan menggunakan rumus berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} \quad (\text{Cochran, W G, 1977})$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = derajat kebebasan (10%)

Untuk penentuan jumlah masyarakat/responden (sampel) berdasarkan jumlah penduduk di wilayah penelitian pada tahun 2017 yaitu dimana Kelurahan Molinow sebanyak 6,123 jiwa dengan presisi

ditetapkan 10% maka dapat ditentukan jumlah sampel berdasarkan kelurahan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$
$$n = \frac{6,123}{6,123 (10\%)^2 + 1}$$
$$n = \frac{6,123}{6,123 (0,01)^2 + 1}$$
$$n = 49 \text{ jiwa}$$

Jadi, jumlah sampel untuk masyarakat adalah sebanyak 49 orang/responden.

Adapun pertimbangan untuk pengambilan sampel yaitu sebagai berikut:

- a. Sampel waktu (hari) yang diambil dapat mewakili kondisi (hari kerja dan hari libur/akhir pekan) dalam 2 minggu.
- b. Sampel (jumlah respon) berdasarkan lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Molinow sebanyak 49 responden.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sampel pada penelitian ini adalah jumlah penduduk sebanyak 49 orang yang tersebar di Kelurahan Molinow yang merupakan bagian kawasan pengembangan perkotaan Kota Kotamobagu, Kecamatan kotamobagu barat Kabupaten Bolaang Mongondow penelitian ini dilakukan tiap hari baik hari kerja maupun hari libur dengan menyebarkan kuestioner sebanyak 49 kuestioner di Kelurahan Molinow dengan pertanyaan-pertanyaan terkait fasilitas sosial yang ada.

E. Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Variabel digunakan dalam proses identifikasi ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan. Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator

No.	Variabel	Indikator
1.	Fasilitas Sosial	1. Fasilitas Pendidikan 2. Fasilitas Kesehatan 3. Fasilitas Peribadatan 4. Fasilitas Olahraga dan Taman Rekreasi (RTH)
2.	Persepsi Masyarakat	1. Sebaran/Lokasi Fasilitas 2. Kondisi Fisik Fasilitas 3. Kebutuhan Fasilitas

Sumber: Hasil Kajian Peneliti

F. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, yaitu:

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama maka digunakan analisis kuantitatif yaitu dilakukan dengan metode perhitungan matematika sesuai dengan kegunaannya, dalam penelitian ini digunakan yaitu analisis kebutuhan fasilitas sosial berdasarkan standar penyediaan sarana/fasilitas, analisis ini dilakukan berdasarkan jumlah penduduk

untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan fasilitas sosial di Kecamatan kotamobagu barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Perencanaan sebuah kawasan kota memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dalam perencanaan tersebut memiliki standarisasi dan akurasi yang baik (Mirsha, 2012). Berikut standarisasi penyediaan fasilitas sosial yaitu:

a. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan formal mempunyai beberapa tingkatan/jenjang yaitu taman kanak – kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU). Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan maupun fasilitas sosial ekonomi lainnya didasarkan pada standar perencanaan kebutuhan sarana kota, dengan standar luasan yang berpedoman pada standar-standar seperti pada tabel berikut;

Tabel 3.2

Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Pendidikan

Sarana Pendidikan	Penduduk Pendukung (Jiwa)	Luas Lahan (Ha)	Daya Tampung
TK	1000	0,025	2 ruang kelas dengan 40 murid/kelas
SD	6000	0,2	6 ruang kelas dengan 40 murid/kelas
SMP	25.000	0,9	Pengalokasian dikelompokkan dengan taman dan lapangan olahraga. Standar jumlah murid 40 murid /kelas

SMA	30.000	1,25	30 murid/ruang kelas dengan pengembangan sesuai kondisi alam dan ketersediaan lahan ditambah taman dan lapangan olahraga
-----	--------	------	--

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota

b. Fasilitas Kesehatan

Kualitas sumberdaya manusia juga akan ditentukan oleh tingkat kesehatan penduduk yang harus ditunjang dengan penyediaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan pada penduduk. Oleh karena itu penyediaan fasilitas kesehatan di kawasan perencanaan perlu mendapat prioritas tersendiri mengingat betapa pentingnya ketersediaan infrastuktur ini. Adapun standarisasi jenis-jenis fasilitas kesehatan dari segi jumlah penduduk dan luas lahan yakni dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.3
Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Kesehatan

SaranaKesehatan	Penduduk Pendukung (jiwa)	Luas lahan (ha)	Radius Pencapaian
Pustu	120.000	0,005	1.500 m
Tempat Praktek Dokter	3.000	0,05	1.500 m
Posyandu	5.000	0,15	2.000 m
Balai Pengobatan	3.000	0,03	-
BKIA/RS Bersalin	30.000	0,65	2.000 m
Puskesmas	120.000	0,65	2.000 m
Rumah Sakit	30.000	8,44	-
Apotek	10.000	-	1.500 m

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota

c. Fasilitas Peribadatan

Penghitung kebutuhan fasilitas peribadatan di kawasan perencanaan disesuaikan dengan jumlah penduduk pemeluk agama yang ada. Berdasarkan data jumlah penduduk menurut agama di kawasan perencanaan menunjukkan bahwa sekitar 98,6 % memeluk agama Islam dan selebihnya beragama Kristen dan Hindu (1,4 %). Hal ini berarti penyediaan fasilitas peribadatan bagi pemeluk agama islam lebih diprioritaskan, yang berupa Masjid dan Mushollah dengan standar pada berikut;

Tabel 3.4

Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Peribadatan

Sarana Peribadatan	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Luas Lahan (Ha)
Masjid	30.000	0,35
Mushallah/Langgar	2.500	0,06

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota

d. Fasilitas Olahraga dan Ruang Terbuka

Fasilitas olahraga dan ruang terbuka adalah semua bangunan dan taman yang digunakan untuk kegiatan olah raga dan rekreasi, fasilitas ini merupakan fasilitas yang cukup penting mengingat fungsinya dalam mengurangi kepadatan kawasan permukiman. Fasilitas ini terdiri dari lapangan olah raga, tempat

bermain dan jalur hijau. Lokasi fasilitas ini umumnya terletak di tengah – tengah lingkungan permukiman terutama untuk taman. Menurut standar perencanaan lingkungan permukiman kota, kebutuhan fasilitas olah raga dan ruang terbuka kawasan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.5
Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Olahraga dan Ruang Terbuka

Sarana Olahraga dan RTH	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Luas Lahan (m²)
Taman	250	1.250
Taman Tempat Bermain	250	1.250
Lapangan Olahraga	250	24.000

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota

2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua maka digunakan analisis kualitatif, yaitu dilakukan secara deskriptif dengan mengidentifikasi dan interpretasi ketersediaan fasilitas sosial di lokasi penelitian. Analisis ini merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang

keadaan sebenarnya. Tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial berdasarkan persepsi masyarakat setelah melakukan penelitian dan identifikasi ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial di lokasi penelitian. Kajian ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial berdasarkan persepsi masyarakat dilakukan dengan membandingkan antara:

- Ketersediaan eksisting (jumlah fasilitas sosial yang ada)
- Standar pelayanan minimum yaitu standar mengenai petunjuk perencanaan fasilitas sosial yang berpedoman pada standar yang dikeluarkan dari kimpraswil (SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota).
- Persepsi masyarakat yang dihasilkan dari kuesioner untuk mengetahui masyarakat bisa memberikan respon disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga akan diperoleh frekuensi kecenderungan masyarakat mengenai kebutuhan fasilitas sosial.

Adapun analisis yang dilakukan menentukan kebutuhan fasilitas sosial berdasarkan persepsi masyarakat disajikan dalam bentuk tabulasi/matriks dari hasil analisis kebutuhan penyediaan fasilitas sosial dan hasil pengumpulan data kuisisioner menurut persepsi masyarakat mengenai kebutuhan fasilitas sosial. Adapun kriteria jawaban dari hasil

pendapat dan persepsi masyarakat tentang fasilitas sosial sebagai berikut:

- 1) Alternatif Jawaban A yaitu Sangat Baik
- 2) Alternatif Jawaban B yaitu Baik
- 3) Alternatif Jawaban C yaitu Sedang
- 4) Alternatif Jawaban D yaitu Buruk
- 5) Alternatif Jawaban E yaitu Buruk Sekali

G. Definisi Operasional

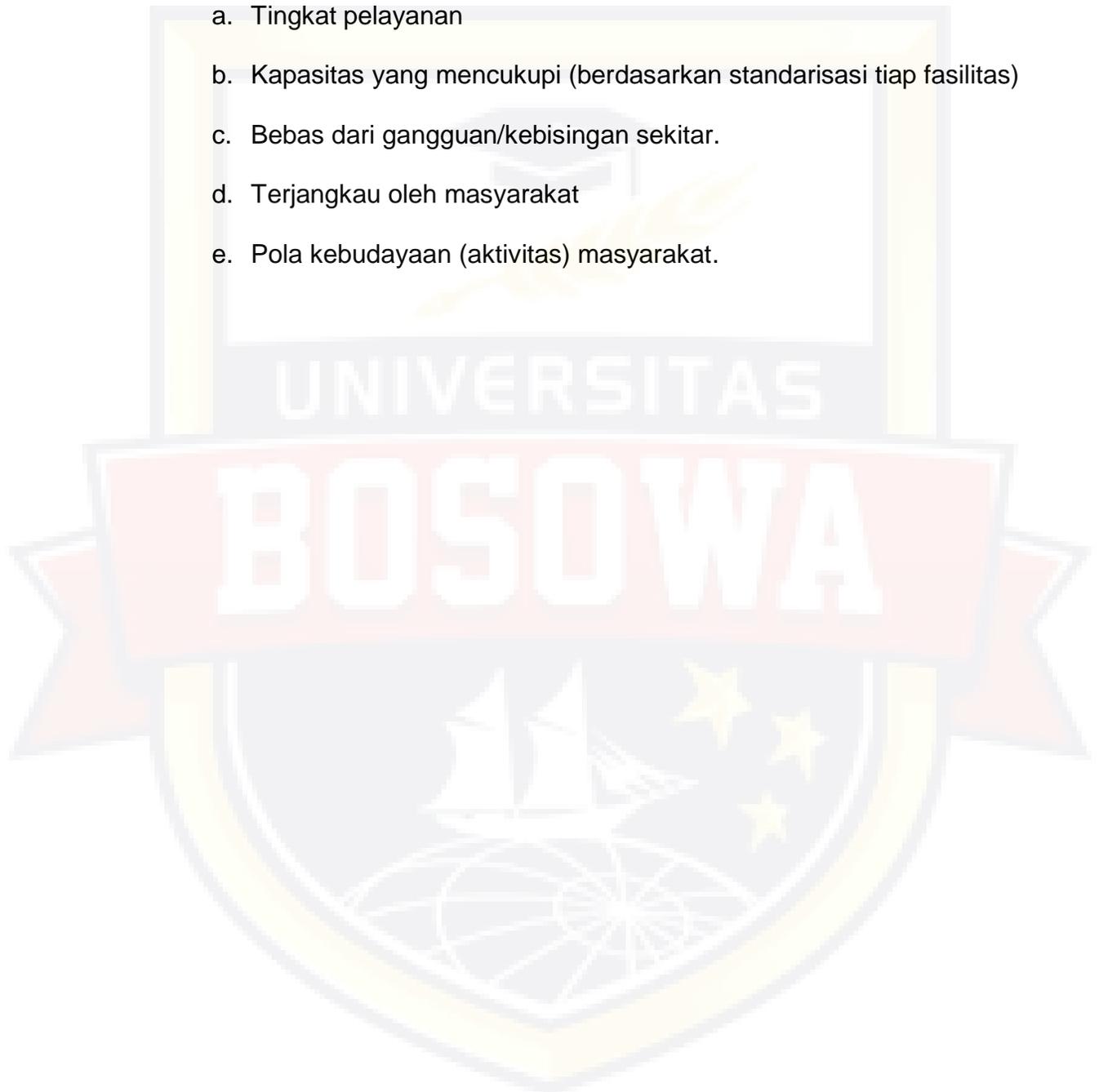
Definisi operasional diperlukan dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang tepat terkait dengan maksud penelitian sehingga menghindari adanya pemaknaan ganda, definisi tersebut antara lain:

1. Fasilitas sosial dimaksud yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas olahraga/taman rekreasi.
2. Kawasan perkotaan didefinisikan sebagai wilayah yang menjadi bagian kawasan perkotaan di Kecamatan kotamobagu barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Dimana kawasan pengembangan perkotaan Kabupaten Bolaang Mongondow yang berada di Kecamatan kotamobagu barat yaitu di Kelurahan Molinow

3. Persepsi masyarakat didefinisikan sebagai pendapat atau saran masyarakat dalam perencanaan dan pengadaan fasilitas sosial yang dibutuhkan di Kelurahan Molinow.
4. Sebaran/Lokasi fasilitas dimaksud adalah jarak antar fasilitas, aksesibilitas fasilitas, sebaran berdasarkan kesesuaian fisik wilayah. Adapun indikator penilaian sebaran/lokasi fasilitas yaitu sebagai berikut:
 - a. Tersentralisasi merata (terpusat)
 - b. Aksesibilitas yang baik
 - c. Jarak/radius antar fasilitas
 - d. Sesuai peruntukan/Kesesuaian lahan
 - e. Tidak berada di Lokasi Rawan Bencana Alam
5. Kondisi fisik fasilitas dimaksud adalah kondisi fasilitas yang baik maupun tidak baik. Adapun indikator penilaian kondisi fisik fasilitas yaitu sebagai berikut:
 - a. Permanen
 - b. Semi Permanen
 - c. Tidak Terbangun

6. Kebutuhan fasilitas dimaksud sebagai berikut:

- a. Tingkat pelayanan
- b. Kapasitas yang mencukupi (berdasarkan standarisasi tiap fasilitas)
- c. Bebas dari gangguan/kebisingan sekitar.
- d. Terjangkau oleh masyarakat
- e. Pola kebudayaan (aktivitas) masyarakat.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kotamobagu Barat

1. Aspek Fisik Dasar

a. Letak Geografis

Kecamatan Kotamobagu Barat merupakan salah satu wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan posisi geografisnya terletak pada $0^{\circ} 30' - 4^{\circ}30'$ Lintang Utara dan $121^{\circ} - 124^{\circ}$ Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat mencakup 10,61 Km² yang meliputi 6 Kelurahan. Secara administratif Kecamatan Kotamobagu

Barat berbatasan dengan wilayah :

- ☞ □ Sebelah Utara : Kecamatan Kotamobagu Utara dan Passi Barat
- ☞ □ Sebelah Selatan : Kecamatan Kotamobagu Timur
- ☞ □ Sebelah Barat : Kecamatan Passi Barat
- ☞ □ Sebelah Timur : Kecamatan Kotamobagu Timur

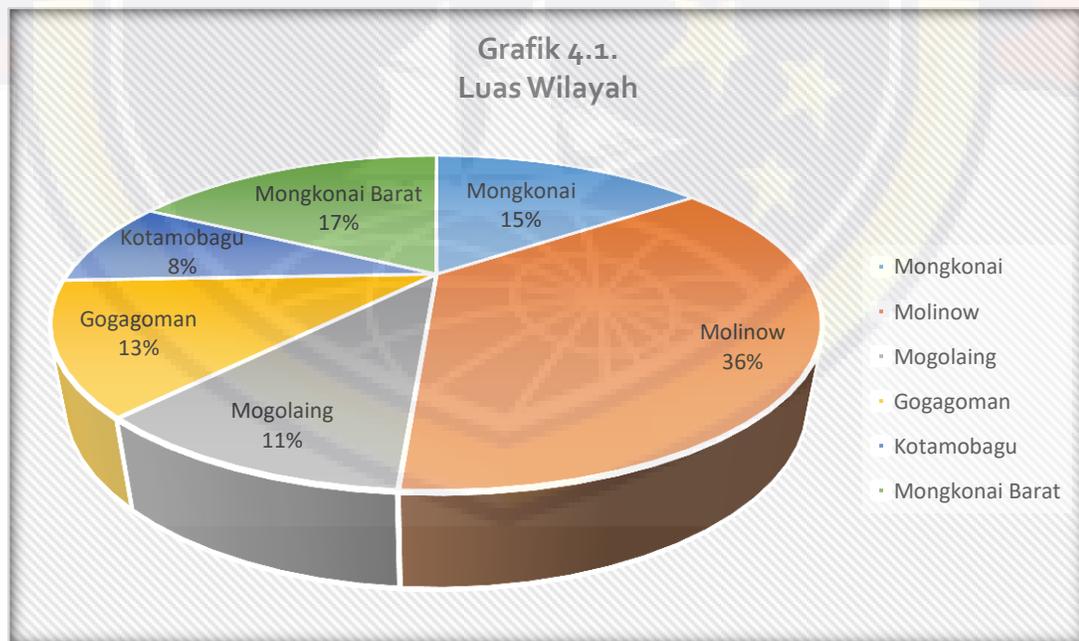
Pemerintah wilayah administratif Kecamatan Kotamobagu Barat sampai pada tahun 2016 terdiri dari 6 (Enam) Kelurahan. Kelurahan yang terbesar/terluas adalah Kelurahan Molinow yaitu 3,83 Km² atau 36,10%, menyusul Kelurahan Mongkonai Barat yaitu 1,83 Km² atau 17,25%. Sedang Wilayah Kelurahan yang mempunyai luasan terkecil

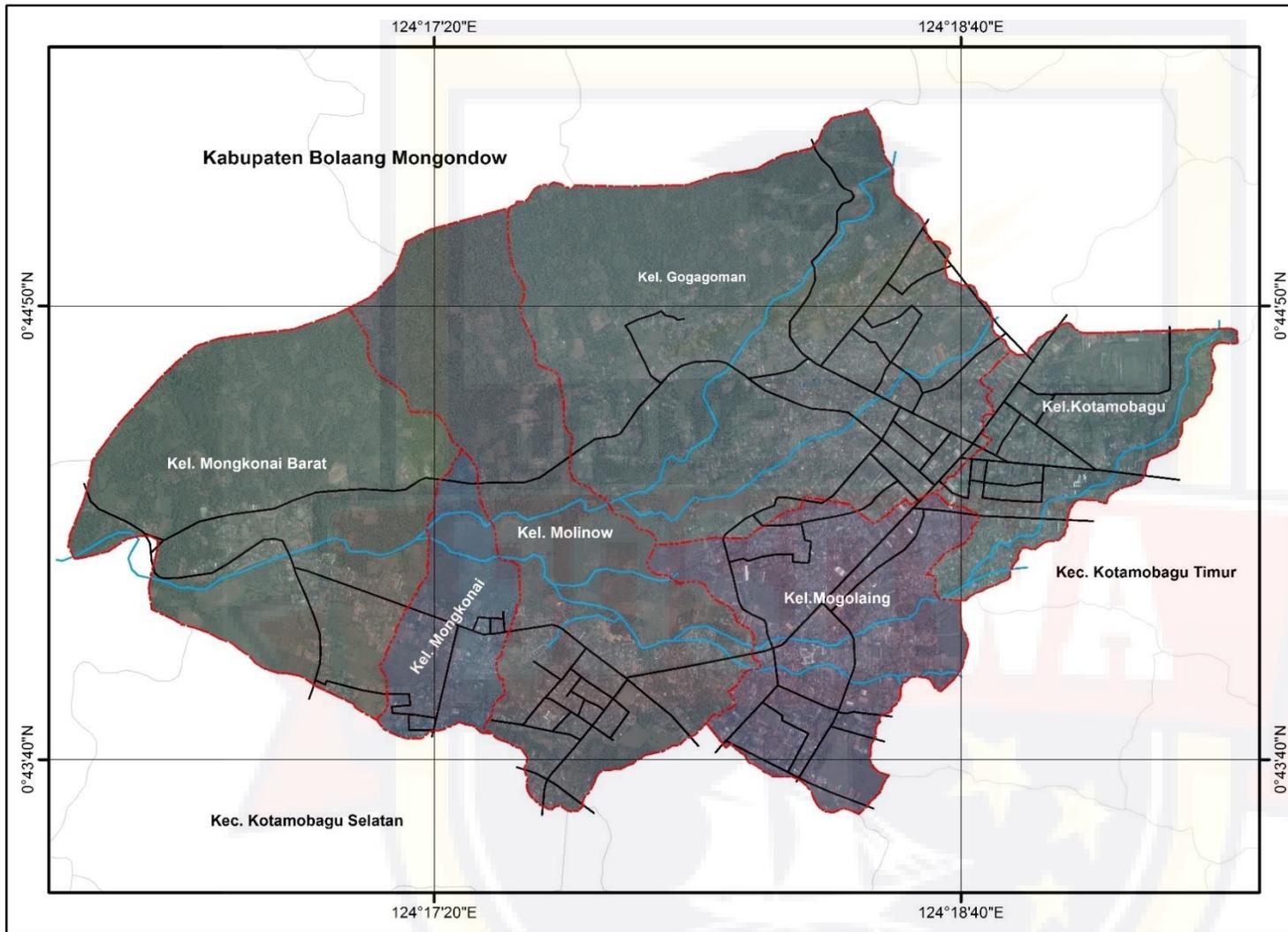
adalah Kelurahan Kotamobagu yaitu 0,89 Km² atau 8,39% dari total luas wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat.

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Kotamobagu Barat
Tahun 2015

No	Kelurahan	Luas/Area (Km ²)	Persentase (%)
1	Mongkonai	1,60	15,08
2	Molinow	3,83	36,10
3	Mogolaing	1,13	10,65
4	Gogagoman	1,33	12,53
5	Kotamobagu	0,89	8,39
6	Mongkonai Barat	1,83	17,25
Jumlah/Total		10,61	100,00

Sumber: Kecamatan Kotamobagu Barat Dalam Angka 2016





Judul Peta: Administrasi Kecamatan Kota Mobagu Barat

Keterangan

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan
- Sungai

Dosen Pembimbing:
Dr. Ir. Syafril, M.Si
Ir. Jufriadi, M.Sp

Mahasiswa:
Marsha Cikita Mokodongan
45 13 042 074

Insert Peta:

Sumber Peta:
Peta Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal
Data Base Indonesia
Citra Satelit

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
TAHUN 2017

b. Kondisi Topografi

Berdasarkan kondisi topografi Wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat berada pada ketinggian 0 – 5 %, dengan bentuk permukaan lahan relatif datar, bergelombang hingga perbukitan. Kondisi topografi tersebut memiliki potensi untuk pengembangan beberapa kegiatan perkeonomian masyarakat seperti pertanian, perkebunan, peruntukan lahan permukiman dan sarana prasarana sosial ekonomi lainnya. Wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat. kondisi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk perkembangan perkebunan, peternakan serta rekonstruksi bangunan guna penyesuaian fungsi sebagai kawasan pengembangan kota. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pembahasan berikut pada table dibawah ini:

Tabel 4.2
Kondisi Topografi Kecamatan Kotamobagu Barat
Tahun 2015

No	Kelurahan	Dataran/Plaint		Perbukitan
		Tinggi	Rendah	
1	Mongkonai	-	1	-
2	Molinow	-	1	-
3	Mogolaing	-	1	-
4	Gogagoman	-	1	-
5	Kotamobagu	-	1	-
6	Mongkonai Barat	-	1	-
	Jumlah/Total	-	6	-

Sumber: Kecamatan Kotamobagu Barat Dalam Angka 2016

c. Kondisi Hidrologi

Kondisi wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat dari aspek Hidrologi terdapat 2 (Dua) aliran sungai yaitu sungai Ongkag Mongondow dengan panjang 3 Km dan sungai Katulidan dengan panjang 2 Km.

Tabel 4.3
Kodisi Hidrologi Kecamatan Kotamobagu Barat
Tahun 2015

No	Nama Sungai	Panjang Sungai
1	Ongkag Mongondow	3
2	Katulidan	2

Sumber: Kecamatan Kotamobagu Barat Dalam Angka 2016

2. Potensi sumber daya Manusia

Potensi sumber daya manusia yang dimiliki tiap wilayah mempunyai karakteristik berbeda, semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan pada suatu wilayah baik kota maupun desa akan membangkitkan jumlah penduduk sehingga kota tersebut menjadi magnet bagi daerah sekitarnya dikarenakan urbanisasi yang semakin meningkat. Sebaiknya hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat agar dapat mengantisipasi laju pertumbuhan serta kepadatan penduduk yang tidak terkendali, supaya dimasa yang akan datang dapat teratasi dan mampu di kendalikan. Adapun data

mengenai Potensi sumber daya manusia Kecamatan Kotamobagu Barat Yaitu:

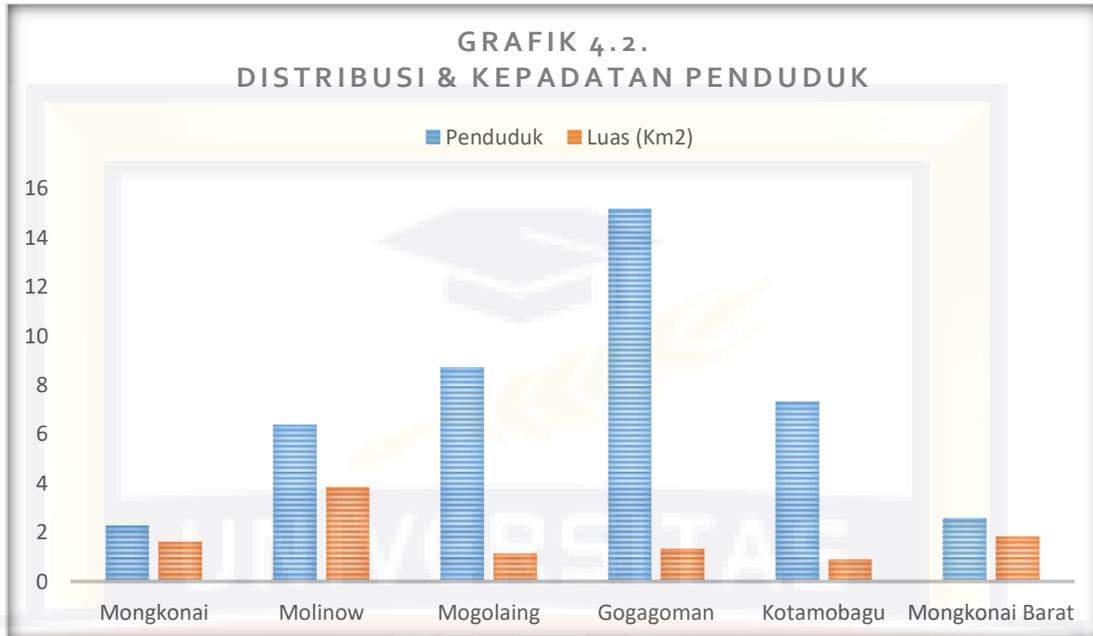
a. Distribusi Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data sekunder dari Biro Pusat Statistik Daerah, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Seiring dengan penambahan penduduk tersebut maka angka kepadatan penduduk per wilayah juga meningkat mengikuti angka penambahan penduduk. Meskipun terjadi peningkatan penduduk secara signifikan pada setiap tahunnya kepadatan penduduk masih dalam ukuran yang relatif jarang untuk masing-masing per satuan wilayah Desa. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2015

No	Laki-Laki	Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan
1	Mongkonai	2.273	1,60	1,420.63
2	Molinow	6.379	3,83	1,665.54
3	Mogolaing	8.716	1,13	7,713.27
4	Gogagoman	15.181	1,33	11,414.29
5	Kotamobagu	7.331	0,89	8,237.08
6	Mongkonai Barat	2.583	1,83	1,411.48
Jumlah		42.463	10,61	4,002.17

Sumber: Kecamatan Kotamobagu Barat Dalam Angka 2016



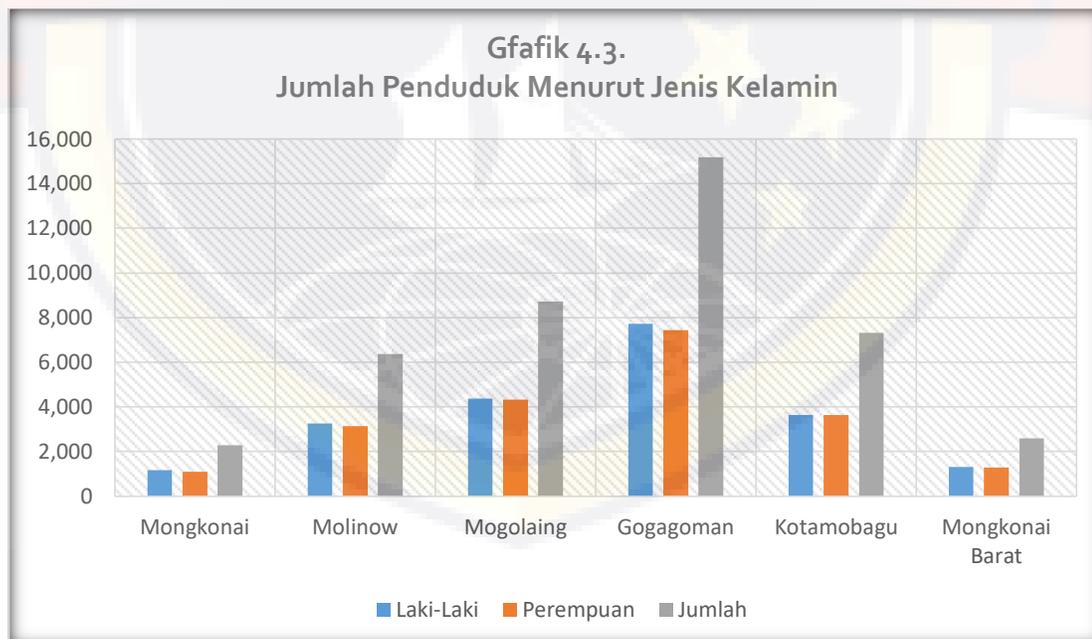
b. Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data dalam angka Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2015 menunjukkan jumlah perkembangan penduduk di dominasi jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 21.542 orang sebagaimana di Kelurahan Gogagoman mendominasi jumlah penduduk menurut Kelurahan dengan jumlah 7.734, dan Kelurahan Mongkonai dengan jumlah terkecil 1,174 sedangkan jumlah jenis kelamin perempuan di Kecamatan Kotamobagu Barat sebanyak 20.921 orang dengan rincian jumlah penduduk perempuan terbanyak berada di Kelurahan Gogagoman sebanyak 7.447 orang dan terendah berada di kelurahan Mongkonai sebanyak 1.099 orang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut ini:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Rasio
Di Kecamatan Kotamobagu Barat 2015

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
1	Mongkonai	1.174	1.099	2.273	106,82
2	Molinow	3.249	3.130	6.379	103,80
3	Mogolaing	4.383	4.333	8.716	101,15
4	Gogagoman	7.734	7.447	15.181	103,85
5	Kotamobagu	3.635	3.635	7.331	101,68
6	Mongkonai Barat	1.306	1.277	2.583	102,27
Jumlah		21.542	20.921	42.463	102,97

Sumber: Kecamatan Kotamobagu Barat Dalam Angka 2016



B. Gambaran Umum Kelurahan Molinow

1. Aspek Fisik Dasar

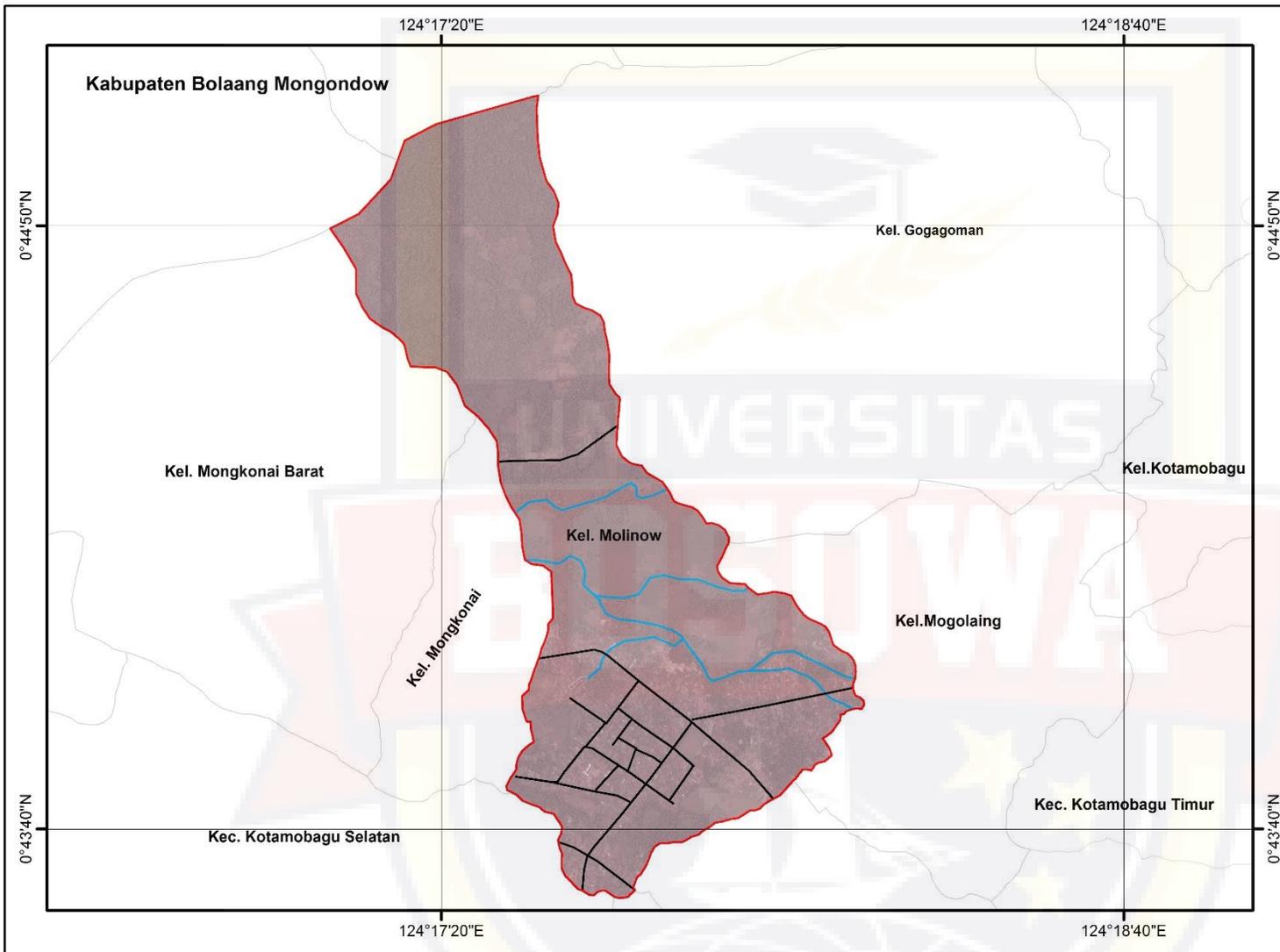
a. Letak Geografis

Kelurahan Molinow berada di wilayah administrasi Kecamatan Kotamobagu Barat yang mana wilayah tersebut terbagi 6 kelurahan/desa sebagaimana penjabaran batas wilayah di bawah berikut ini:

- Sebelah Utara : Kelurahan Mogolaing
- Sebelah Selatan : Kelurahan Pobundayan
- Sebelah Barat : Kelurahan Mongkonai
- Sebelah Timur : Kelurahan Gogagoman

b. Kondisi Topografi Dan Kemiringan Lereng

Berdasarkan kondisi topografi Wilayah Kelurahan Molinow berada pada ketinggian 0 – 5 %, dengan bentuk permukaan lahan relatif datar, bergelombang hingga perbukitan. Kondisi topografi tersebut memiliki potensi untuk pengembangan beberapa kegiatan perkeonomian masyarakat seperti pertanian, perkebunan, peruntukan lahan permukiman dan sarana prasarana sosial ekonomi lainnya serta rekayasa rekonstruksi pembangunan fisik guna pengembangan Wilayah Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat sebagai kawasan pengembangan perkotaan.



Judul Peta: Administrasi Kelurahan Molinow

Keterangan

- Batas Kelurahan
- Jalan
- Sungai

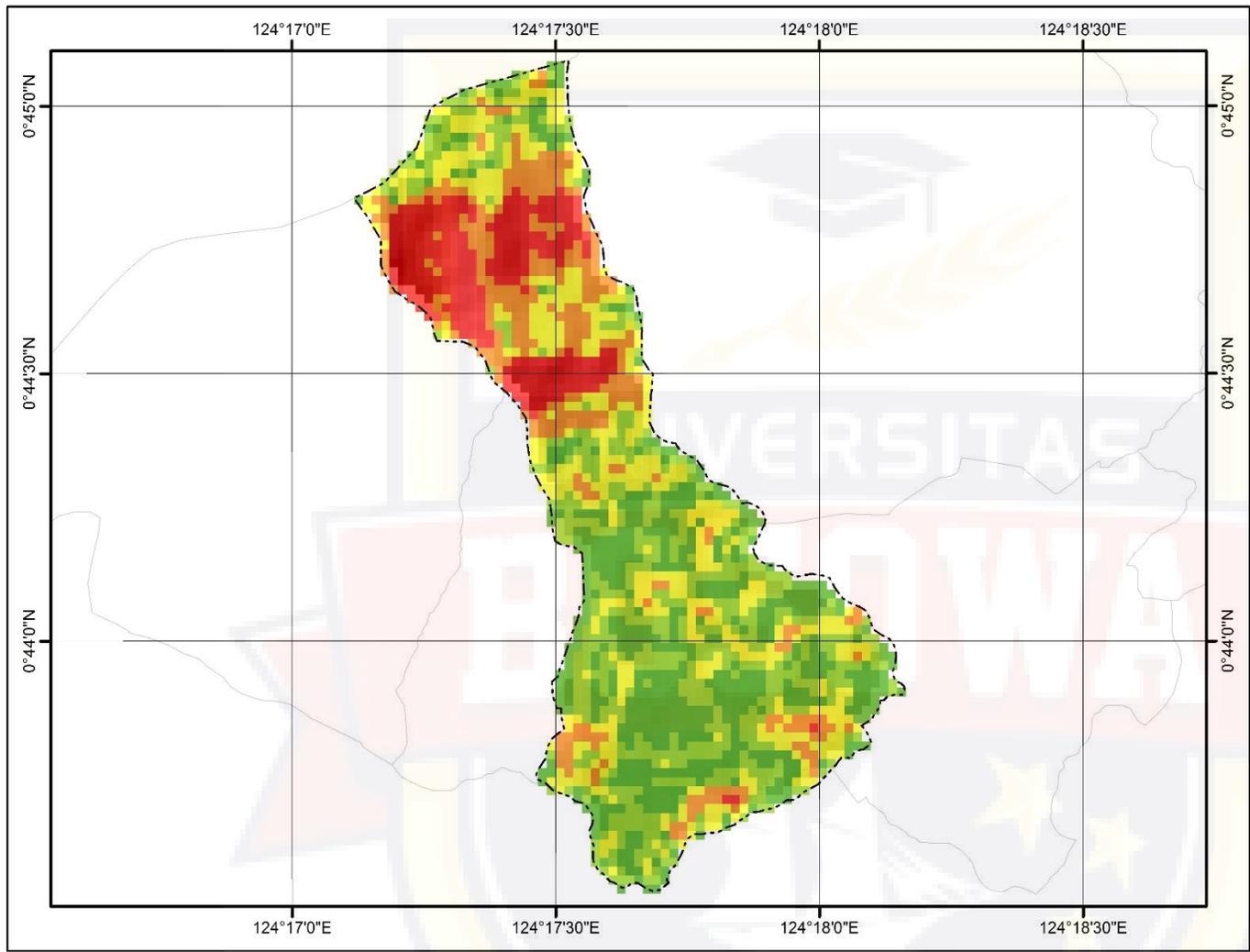
Dosen Pembimbing:
Dr. Ir. Syafri, M.Si
Ir. Jufriadi, M.Sp

Mahasiswa:
Marsha Cikita Mokodongan
45 13 042 074

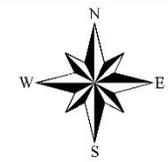
Insert Peta:

Sumber Peta:
Peta Rupa Bumi Indonesia Bakosurtana
Data Base Indonesia
Citra Satelit

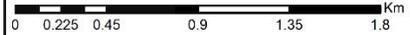
JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
TAHUN 2017



Judul Peta:
Kemiringan Topografi



1: 20.000



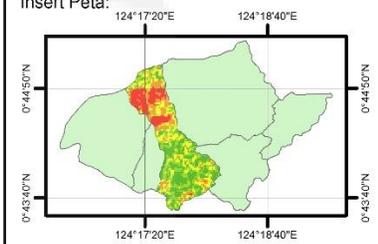
Keterangan

- Batas Kelurahan
- 0 - 8 %
- 8 - 15 %
- 15 - 25 %
- 25 - 45 %
- 45 >

Dosen Pembimbing:
Dr. Ir. Syafri, M.Si
Ir. Jufriadi, M.Sp

Mahasiswa: Marsa Chikita Mokodongan
45 13 042 074

Insert Peta:



Sumber Peta:
Peta RBI Bankosurtanal
Data Base Indonesia
Citra Satelit



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
TAHUN 2017

c. Kondisi Geologi

1) Grup Aluvial

Grup Aluvial Di daerah Kotamobagu merupakan Landform muda (Resen) yang terbentuk dari proses aluvial (aktivitas sungai). Penyebaran Landform Aluvial umumnya disekitar sungai, dataran Aluvial, pelembahan, dan lereng bawah dari perbukitan. Grup Aluvial dapat dibedakan menjadi dataran Aluvial, dasar lembah dan jalur aliran sungai:

- **Dataran Aluvial**

Merupakan dataran datar yang terbentuk di bagian hilir dari sungai besar yang tersusun dari bahan-bahan baru dari sungai tersebut. Pada umumnya terbentuk dari endapan halus dan kasar.

- **Jalur Aliran Sungai**

Merupakan lahan sepanjang aliran sungai dari endapan halus dan kasar. Satuan Landform ini memiliki relief dan datar dengan lereng.

2) Grup Tektonik

Landform terbentuk akibat dari proses tektonik, berupa proses angkatan, lipatan, dan atau patahan. Bentuk landform tersebut ditentukan oleh proses-proses diatas dan sifat litologinya

(structural). Landform tektonik mempunyai penyebaran di bagian barat.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar harapan akan mempertahankan kealamian kemampuan lingkungan hidup terus terjaga. Dalam kaitan ini, maka pemanfaatan sumberdaya alam harus memperhatikan aspek konservasi dan pelestariannya agar pembangunan dapat dilanjutkan. Untuk itu, perlu inventarisasi sejauh mana potensi sumberdaya alam yang ada serta tingkat pemanfaatannya, Sehingga pengembangan potensi sumberdaya alam di kelurahan Molinow perlu penerapan beberapa strategi guna tersinerginya pemanfaatan sumber daya alam, manusia dan sumber daya buatan. Adapun kondisi kelurahan Molinow sumberdaya alam di dominasi pertanian dan perkebunan rakyat skala kecil.

3. Potensi Sumber Daya Manusia

Populasi adalah keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena, atau konsep yang menjadi pusat perhatian. Adapun populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat yang ada di Kelurahan Molinow sebanyak 6,123 jiwa.

4. Potensi Sumber Daya Buatan

Dalam rangka pembangunan dan peningkatan kualitas hidup manusia, maka ketersediaan akan sarana dan prasarana perkotaan seperti fasilitas pendidikan, perdagangan, kesehatan, perkantoran, peribadatan dan sarana olahraga, air bersih, listrik, persampahan, drainase dan sebagainya sangat diperlukan sebagai wujud dari pada pemerataan pembangunan disegala aspek kehidupan, sehingga pada pembahasan ini akan diuraikan data-data mengenai sebaran sarana dan prasaana di kawasan penelitian

a. Sebaran Fasilitas

Identifikasi terhadap sarana di Kelurahan Molinow terdiri dari; sarana perkantoran, perumahan, pendidikan, peribadatan, kesehatan, serta sarana olahraga dan Ruang terbuka hijau. Untuk lebih jelasnya kondisi sarana sebagaimana pada pembahasan berikut;

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meningkat, pendidikan tidak lagi di anggap sesuatu yang mewah akan tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok. Hal ini juga didukung oleh berbagai program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas

pendidikan seperti peningkatan anggaran pendidikan, pemberian tunjangan kepada guru yang telah memperoleh sertifikat, penyaluran Biaya Operasional (BOS), dan berbagai program lainnya. Peningkatan partisipasi pendidikan merupakan sinyal yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama pembangunan. Namun, hal ini harus diikuti dengan peningkatan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidikan yang memadai.

1) Pendidikan

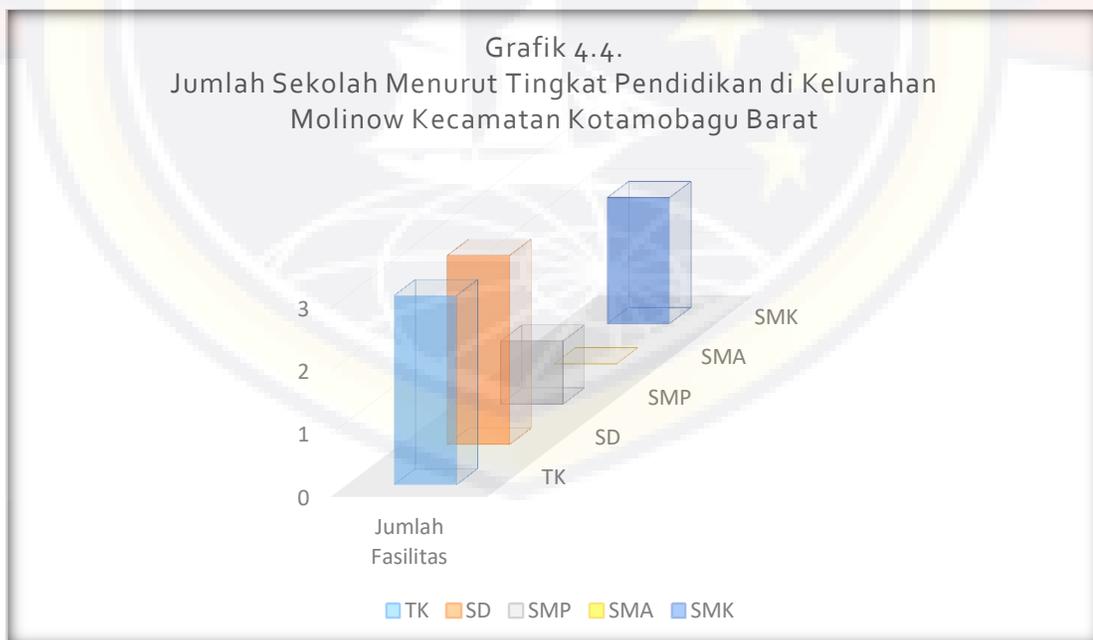
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meningkat, pendidikan tidak lagi dianggap sesuatu yang mewah akan tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok. Hal ini juga didukung oleh berbagai program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti peningkatan anggaran pendidikan, pemberian tunjangan kepada guru yang telah memperoleh sertifikat, penyaluran Biaya Operasional (BOS), dan berbagai program lainnya. Peningkatan partisipasi pendidikan merupakan sinyal yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama pembangunan. Namun, hal ini harus diikuti dengan peningkatan sarana fisik pendidikan dan

tenaga pendidikan yang memadai. Sebagaimana pada pada pembahasan jumlah fasilitas pendidikan pada table berikut ini:

Tabel 4.6
Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Molinow
Kecamatan Kotamobagu Barat

No	Kelurahan	Jumlah Fasilitas
1	Taman Kanak-kanak (TK)	3
2	Sekolah Dasar (SD)	3
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-
5	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2
Jumlah		

Sumber: Kecamatan Kotamobagu Barat Dalam Angka Tahun 2016



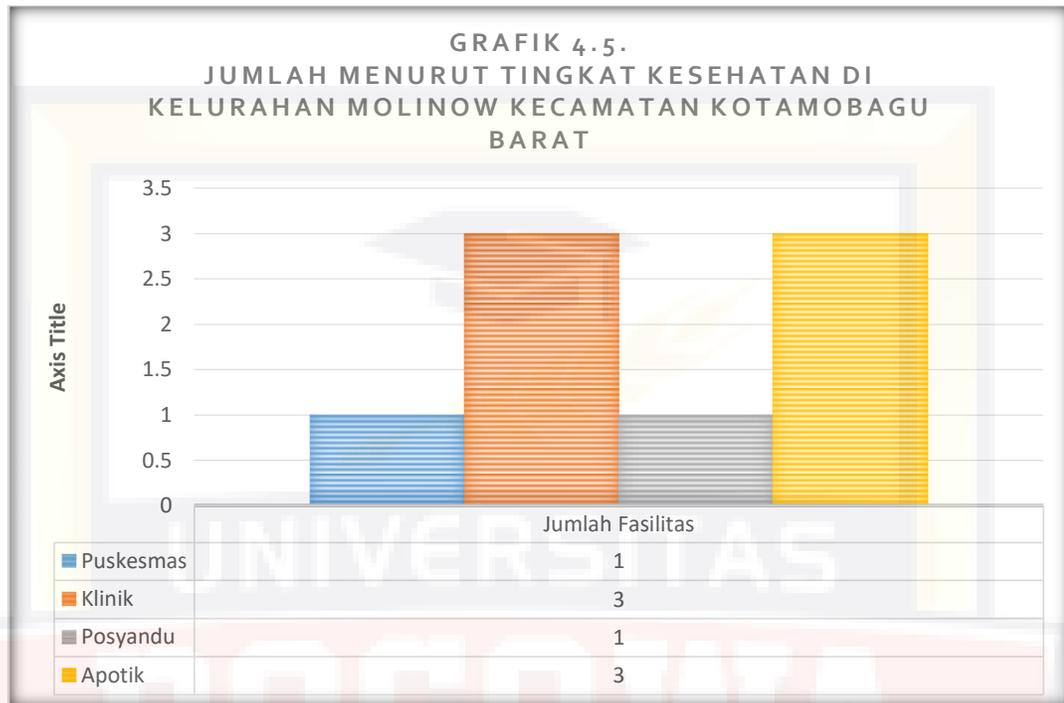
2) Kesehatan

Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat akan terwujud apabila tersedia fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, dukungan pemerintah dan swasta juga diperlukan, fasilitas kesehatan yang tersedia di Kelurahan Malinow guna tercapainya visi dan misi mensejahterakan masyarakat baik melalui pangan dan penyehatan lingkungan dan manusia. Sehingga ketersediaan fasilitas kesehatan sangat di perlukan maka negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat yang tersebar di beberapa wilayah kelurahan Molinow. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada pembahasan di bawah berikut ini:

Tabel 4.7
Jumlah Menurut Tingkat Kesehatan di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat

No	Kelurahan	Jumlah Fasilitas
1	Puskesmas	1
2	Klinik	3
3	Posyandu	1
4	Apotik	3
Jumlah		

Sumber: Kecamatan Kotamobagu Barat Dalam Angka Tahun 2016



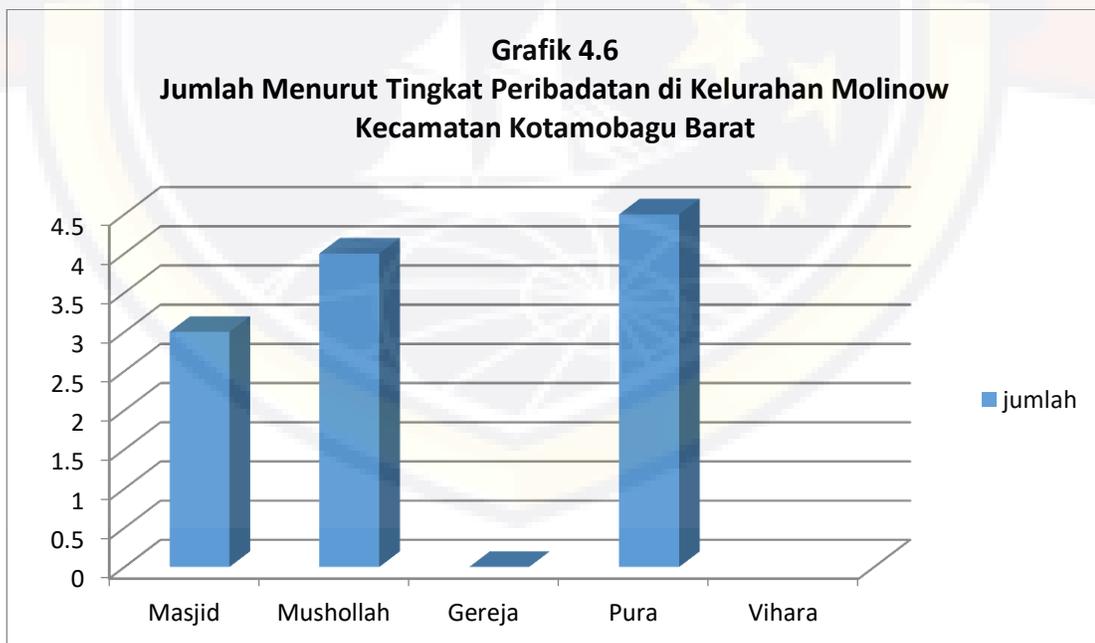
3. Peribadatan

Keberadaan fasilitas peribadatan dalam suatu lingkungan wilayah/perkotaan/kelurahan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, sebagai wujud dalam mendekati diri kepada Sang Pencipta. Melihat dari jumlah penduduk menurut agama di kelurahan Molinow lebih banyak didominasi oleh pemeluk agama islam. Sebagaimana dapat dilihat dari jumlah fasilitas peribadatan yaitu Nampak jumlah masjid/mushalla sebanyak 2 unit yang tersebar di Kelurahan Molinow. Untuk lebih jelasnya Sebagaimana dapat dilihat kondisi jumlah existing pada penjabaran pada table di bawah berikui ini:

Tabel 4.8
Jumlah Menurut Tingkat Peribadatan di Kelurahan Molinow Kecamatan
Kotamobagu Barat

No	Kelurahan	Jumlah Fasilitas
1	Masjid	3
2	Mushollah	4
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-
Jumlah		

Sumber: Kecamatan Kotamobagu Barat Dalam Angka Tahun 2016



C. Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Fasilitas Sosial di Kelurahan

Molinow

Pada pembahasan analisis ketersediaan fasilitas social di kelurahan Molinow perlu memperhatikan indicator/variabel-variabel dalam menganalisis kebutuhan fasilitas social berdasarkan standar penyediaan sarana/fasilitas serta bagaimana kebutuhan fasilitas social di Kelurahan Molinow berdasarkan persepsi masyarakat. Pada pembahasan ini disajikan hasil analisis untuk mengetahui seberapa besar ketersediaan fasilitas social dan kebutuhan fasilitas social berdasarkan persepsi masyarakat. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada pembahasan berikut ini:

Untuk mengetahui kebutuhan jumlah penduduk berdasarkan standar penyediaan sarana/fasilitas social kawasan perkotaan, maka untuk memperoleh jumlah kebutuhan fasilitas sosial maka di perlukan peninjauan jumlah penduduk, berdasarkan angka tahun dasar (*5 tahun*). Kemudian menggunakan alat analisis bunga berganda untuk memperoleh estimasi jumlah penduduk.

Tabel 4.9
Angka Tahun Dasar Jumlah Penduduk Kelurahan Molinow

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan	r/Tahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2013	5.677		-
2	2014	5.713	36	0,63
3	2015	5.760	47	0,81
4	2016	6.379	619	9,70
5	2017	6.442	63	0,97

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

1. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan formal mempunyai beberapa tingkatan/jenjang yaitu taman kanak – kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU). Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan maupun fasilitas sosial ekonomi lainnya didasarkan pada standar perencanaan kebutuhan sarana kota, yaitu standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2010 dengan standar luasan yang berpedoman pada standar-standar seperti pada standar-standar seperti pada tabel berikut;



Gambar 4.1. Kondisi Fasilitas Pendidikan



Tabel 4.10

Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Molinow

No	Sarana Pendidikan	Existing	NSPM	Jumlah Penduduk	Selisih	Kebutuhan Fasilitas
1	TK	3	1.000	6.442	-6	3
2	SD	3	6.000	6.442	1	0
3	SMP	1	25.000	6.442	0	0
4	SMK	2	30.000	6.442	0	0

2. Fasilitas Kesehatan

Pengembangan sarana kesehatan berdasarkan standar kebutuhan tidak dianggap baku, tetapi secara fleksibel sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman dan kondisi perkotaan setempat, maka berdasarkan analisa melalui perbandingan tingkat ketersediaan dan kebutuhan fasilitas social dengan membandingkan jumlah penduduk pendukung standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Berikut standar pelayanan minimum Fasilitas Kesehatan;



Gambar 4.2. Kondisi Fasilitas Kesehatan

Tabel 4.11

Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Kesehatan

Sarana Kesehatan	Penduduk Pendukung (Jiwa)	(M ²)
RS	30.000	3.200
Puskesmas	120.000	2.400
Balai pengobatan/Klinik/Praktek Dokter	3.000	600
Posyandu	5.000	500
Apotik	10.000	700

Sebagaimana berdasarkan hasil analisa berikut maka terurai jumlah kebutuhan fasilitas social dan ketersediaan fasilitas social dengan menyandingkan standar pelayanan minimum, sebagaimana pada table dibawah berikut ini:

Tabel 4.12

Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Molinow

No	Sarana Kesehatan	Existing	NSPM	Jumlah Penduduk	Selisih	Kebutuhan Fasilitas
1	Rumah Sakit	-	30.000	6.442	0	0
2	Puskesmas/ Pustu	1	120.000	6.442	0	0
3	Klinik/Praktek Dokter	3	3000	6.442	2	0
4	Posyandu	1	5000	6.442	1	0
5	Apotek	3	10.000	6.442	0	0

3. Fasilitas Peribadatan

Berdasarkan hasil analisis maka perbandingan jumlah penduduk dengan kebutuhan fasilitas social masyarakat dengan menjadikan standar penduduk pendukung sebagai acuan mengukur jumlah kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk.



Gambar 4.3. Kondisi Fasilitas Peribadatan

Tabel 4.13**Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Peribadatan**

Sarana Peribadatan	Penduduk Pendukung (Jiwa)	Luas Lahan (Ha)
Masjid	30.000	0,35
Mushalla	2.500	0,06
Gereja	5.000-10.000	0,35

Tabel 4.14**Standar Kebutuhan Pelayanan Minimum Fasilitas Peribadatan di Kelurahan Molinow**

No	Sarana Peribadatan	Existing	NSPM	Jumlah Penduduk	Selisih	Kebutuhan Fasilitas
1	Masjid	3	30.000	6.442	0	0
2	Musholla	4	2.500	6.442	2	0
3	Gereja	-	5.000	6.442	-1	-
4	Pura	-	5.000	6.442	-1	-
5	Vihara	-	5.000	6.442	-1	-

4. Fasilitas Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Perkembangan ruang terbuka hijau (RTH) harus terpenuhi sesuai dengan amanat undang undang Penataan ruang nomor 26 tahun 2007 yang termuat dalam wujud pemenuhan rth 30%, sehingga pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau dibedakan menjadi 2 ruang yang mana biasa disebut dengan kawasan ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka public maka pengalokasian ruang terbuka hijau harus sesuai dengan standar pemenuhan kawasan ruang terbuka hijau Adapun kondisi ruang terbuka hijau di kelurahan Molinow pada gambar berikut ini:



Gambar .41 Taman



Gambar 4.2 Lapangan Sepak Bola



Gambar 4.3 Lapangan Bola Voli



Gambar 4.4 Taman

Kondisi Ruang terbuka Hijau Kelurahan Molinow

Tabel 4.15

Standar Pelayanan Minimum Fasilitas Olahraga dan Rekreasi/RTH

Sarana Olahraga dan RTH	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Luas Lahan (Ha)
Taman Lingkungan	250 jiwa	0,3
Taman Olahraga	250 jiwa	0,2
Parkir Lingkungan	2500 jiwa	3% dari Luas Kawasan dengan jumlah penduduk pendukung

Sumberdaya manusia secara psikologi tidak terlepas dari ruang public yang terjadi interaksi antara manusia dengan berbagai karakter dan sifat masing-masing manusia lainnya sehingga sebuah interaksi menghadirkan serta mengolah pola pikir yang jauh lebih mendewasakan dengan caranya masing-masing, sehingga interaksi secara manusiawi merupakan hal umum yang mestinya terlaksana.

Tabel 4.16
Standar Kebutuhan Pelayanan Minimum Fasilitas Olahraga/RTH di Kelurahan Molinow

No	Sarana Peribadatan	Existing	NSPM	Jumlah Penduduk	Selisih	Kebutuhan Fasilitas (Unit)
1	Lapangan Bola Kaki/Futsal	1	250	6.442	-25	24
2	Lapangan Basket	-	250	6.442	-25	24
3	Taman	1	250	6.442	-25	24
4	Lapangan Volly	1	250	6.442	-25	24
						96

Berdasarkan hasil analisis dari keseluruhan fasilitas social dengan menggunakan standar pelayanan minimal sebagai panduan mencari tingkat kebutuhan fasilitas social masyarakat maka dari 4 variabel maka kebutuhan fasilitas social berada pada fasilitas Pendidikan sebanyak 3 unit taman kanak-kanak sedangkan fasilitas olahraga/ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 96 unit.

D. Analisis Kebutuhan Fasilitas Sosial di Kelurahan Molinow

Berdasarkan Persepsi Masyarakat

Pada tahap ini perlu dilakukan rekapitulasi hasil observasi lapangan atau hasil wawancara guna meninjau sejauh mana persepsi masyarakat akan ketersediaan dan kebutuhan fasilitas social dalam penunjang kegiatan dalam beraktivitas sehari hari, maka adapun pembahasannya sebagaimana pada table dibawah berikut ini:

1. Pendidikan

Berdasarkan hasil observasi lapangan (wawancara) mengenai kebutuhan fasilitas social pendidikan di tinjau dari persepsi masyarakat menunjukkan kebutuhan fasilitas social taman kanak-kanak (STK) hanya 30% merespon “iya” dan 70% “tidak” dengan kebutuhan 15 unit. Fasilitas sekolah menengah pertama hanya 24% “iya” serta 76% kebutuhan fasilitas social 12 unit. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada table berikut ini:

Tabel 4.17.
Jumlah Kebutuhan Fasilitas Sosial Pendidikan Berdasarkan Persepsi Masyarakat

No	Fasilitas	Persepsi Masyarakat	
		Ya	Tidak
1	TK	30%	70%
2	SD	-	100%
3	SMP	24%	76%
4	SMA	16%	84%
5	SMK	-	-

2. Kesehatan

Berdasarkan hasil observasi lapangan (wawancara) mengenai kebutuhan fasilitas social kesehatan di tinjau dari persepsi masyarakat menunjukkan kebutuhan fasilitas social rumah sakit berdasarkan persepsi masyarakat hanya 79 “iya” dan 21 “tidak” serta kebutuhan fasilitas 39 unit. Fasilitas puskesmas 30% “iya” dan 70% “tidak” dengan kebutuhan jumlah fasilitas 15 unit. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada pembahasan table berikut ini:

Tabel 4.18.
Jumlah Kebutuhan Fasilitas Sosial Kesehatan Berdasarkan Persepsi Masyarakat

No	Fasilitas	Persepsi Masyarakat	
		Ya	Tidak
1	Rumah Sakit	79%	21%
2	Puskesmas	30%	70%
3	Klinik/Praktek dokter	2%	88%
4	Posyandu	44%	54%
5	Apotek	-	100%

3. Peribadatan

Berdasarkan hasil observasi lapangan (wawancara) mengenai kebutuhan fasilitas social peribadatan di tinjau dari persepsi masyarakat menunjukkan kebutuhan fasilitas social masjid berdasarkan persepsi masyarakat 67% “ya” dan 33% “tidak” dengan jumlah kebutuhan fasilitas social 33 unit. Sebagaimana lebih jelas pada table dibawah berikut ini:

Tabel 4.19.
Jumlah Kebutuhan Fasilitas Sosial peribadatan Berdasarkan Persepsi Masyarakat

No	Fasilitas	Persepsi Masyarakat	
		Ya	Tidak
1	Masjid	67%	33%
2	Musholla	12%	88%
3	Gereja	1%	99%
4	Vihara	-	-
5	Pure	-	-

4. Olahraga Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan hasil observasi lapangan (wawancara) mengenai kebutuhan fasilitas social olahraga ruang terbuka hijau di tinjau dari persepsi masyarakat menunjukkan kebutuhan fasilitas social bidang lapangan bola kaki/futsal 2 unit dengan persepsi pandangan 4% “ya” dan 86 “tidak”. Fasilitas social lapangan basket 83% “ya” dan 17 “tidak”. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada lampiran table di bawah berikut ini:

Tabel 4.20.
Jumlah Kebutuhan Fasilitas Sosial Berdasarkan Persepsi Masyarakat

No	Fasilitas	Persepsi Masyarakat	
		Ya	Tidak
1	Lapangan Bola Kaki/Futsal	4%	86%
2	Lapangan Basket	83%	17%
3	Taman	32%	68%
4	Lapangan Volly	14%	86%

E. Rekapitulasi dan Sinkronisasi Kebutuhan Fasilitas Sosial

Berdasarkan NSPK dan Persepsi Masyarakat

1. Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan hasil penggabungan dari norma standar pelayanan kebutuhan (NSPK) dan kebutuhan fasilitas berdasarkan persepsi masyarakat menunjukkan kebutuhan fasilitas taman kanak-kanak (TK) ditinjau dari NSPK menyatakan akan kebutuhan/penambahan jumlah fasilitas taman kanak-kanak dan selaras dengan persepsi masyarakat, pada fasilitas sekolah dasar (SD) menampilkan bahwa tidak perlu penambahan sebagaimana menurut NSPK dan Persepsi masyarakat menyatakan tidak perlu adanya penambahan dikarenakan telah memenuhi standar dan dianggap telah mencukupi menurut masyarakat begitu pula dengan fasilitas social lainnya berupa fasilitas sekolah menengah pertama (SMP/SLTP). Kebutuhan fasilitas sekolah menengah atas (SLTA/SMA) juga menunjukkan berdasarkan NSPK dan persepsi masyarakat jelas mengarahkan tidak perlunya penambahan fasilitas. Maka berdasarkan pemaparan di atas dan untuk lebih jelasnya sebagaimana pada pada table di bawah berikut ini.

Tabel 4.21
Sinkronisasi Kebutuhan Fasilitas Sosial Pendidikan

No	Fasilitas Sosial	Menurut NSPK		Kebutuhan (Unit)	Menurut Persepsi Masyarakat		Keterangan
		Cukup	Tidak Cukup		Cukup	Tidak Cukup	
1	Taman Kanak-kanak (TK)	-	✓	3	✓	-	Kebutuhan TK tidak sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.
2	Sekolah Dasar (SD)	✓	-	0	✓	-	Kebutuhan SD sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP)	✓	-	0	✓	-	Kebutuhan SMP sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.
4	Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA)	✓	-	0	✓	-	Kebutuhan SMA sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.
5	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	✓	-	0	✓	-	Kebutuhan SMK sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.

2. Fasilitas Kesehatan

berdasarkan dari hasil Analisa norma standar kebutuhan (NSPK) dan persepsi masyarakat, adapun aspek kebutuhan fasilitas rumah sakit menurut NSPK tidak perlu penambahan (Cukup) sedangkan menurut persepsi masyarakat perlu dilakukan perencanaan atau penambahan fasilitas rumah sakit, kebutuhan fasilitas puskesmas/pustu sebagaimana berdasarkan standar NSPK tidak perlu penambahan (cukup) dan persepsi masyarakat juga tidak menegaskan tidak perlu dilakukan penambahan sehingga sinkronisasi antara NSPK dan Perspsi masyarakat jelas akan status kebutuhan fasilitas social puskesmas dan begitu pula dengan kebutuhan fasilitas social klinik dokter, posyandu dan apotik (tidak perlu ada penambahan). Untuk lebih jelasnya sebagaimana penjabaran pada table di bawah berikut ini:

Tabel 4.22
Sinkronisasi Kebutuhan Fasilitas Sosial Kesehatan

No	Fasilitas Sosial	Menurut NSPK		Kebutuhan (Unit)	Menurut Persepsi Masyarakat		Keterangan
		Cukup	Tidak Cukup		Cukup	Tidak Cukup	
1	Rumah Sakit	✓	-	0	-	✓	Kebutuhan Rumah Sakit tidak sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.
2	Puskesmas/pustu	✓	-	0	✓	-	Kebutuhan Puskesmas/Pustu sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.
3	Klinik Dokter	✓	-	0	✓	-	Kebutuhan Klinik Dokter sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.
4	Posyandu	✓	-	0	✓	-	Kebutuhan Posyandu sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.
5	Apotik	✓	-	0	✓	-	Kebutuhan Apotek sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.

3. Fasilitas Peribadatan

Berdasarkan hasil analisis NSPK dan persepsi masyarakat menunjukkan kebutuhan fasilitas peribadatan yaitu kebutuhan fasilitas peribadatan masjid pada NSPK tidak mengalami penambahan (cukup) sedangkan berdasarkan persepsi masyarakat menunjukkan perlu di lakukannya penambahan fasilitas sehingga perlunya peninjauan serta penyesuaian kondisi lapangan dan Analisa cukup mendalam agar selaras akan kebutuhan menurut persepsi masyarakat, adapun fasilitas mushalla dan gereja juga tidak perlu dilakukan penambahan sebagaimana pada pembahasan diatas. Untuk lebih jelasnya pemaparannya dapat dilihat pada table di bawah berikut ini:

Tabel 4.23
Sinkronisasi Kebutuhan Fasilitas Sosial Peribadatan

No	Fasilitas Sosial	Menurut NSPK		Kebutuhan (Unit)	Menurut Persepsi Masyarakat		Keterangan
		Cukup	Tidak Cukup		Cukup	Tidak Cukup	
1	Masjid	✓	-	0	-	✓	Kebutuhan Masjid sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.
2	Mushalla	✓	-	0	✓	-	Kebutuhan Mushalla sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.
3	Gereja	✓	-	0	✓	-	Kebutuhan Gereja sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.

4. Fasilitas Taman Olahraga/RTH

Perencanaan yang terstruktur sangat diharapkan dalam pengembangan sebuah kawasan ataupun daerah maka perencanaan tanpa perhitungan dan tanpa melibatkan masyarakat sangat berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Adapun berdasarkan hasil analisis NSPK dan persepsi masyarakat menunjukkan kebutuhan fasilitas taman olahraga/RTH yaitu kebutuhan fasilitas taman olahraga RTH lapangan bola kaki/futsal pada NSPK perlu melakukan penambahan (tidak cukup) sedangkan menurut persepsi masyarakat tidak perlu dilakukan penambahan fasilitas, adapun kebutuhan taman sebagaimana NSPK juga perlu pemenuhan kebutuhan sedangkan menurut persepsi masyarakat tidak perlu dilakukan penambahan dan begitupula dengan kebutuhan fasilitas lapangan volley dan kebutuhan lapangan basket berdasarkan NSPK tidak perlu dilakukan penambahan sedangkan menurut persepsi masyarakat perlu dilakukan penambahan sehingga penyelarasan akan kebutuhan fasilitas social lapangan volley perlu dilakukan kajian lebih mendalam guna mencapai solusi dan tersinkronkan antara persepsi dengan norma standar kebutuhan pelayanan fasilitas sosial.

Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada table dibawah berikut ini:

Tabel 4.24

Sinkronisasi Kebutuhan Fasilitas Sosial Taman Olahraga

Fasilitas Sosial	Menurut NSPK		Kebutuhan (Unit)	Menurut Persepsi Masyarakat		Keterangan
	Cukup	Tidak Cukup		Cukup	Tidak Cukup	
Lapangan Bola Kaki/Futsal	-	✓	24	✓	-	Kebutuhan Lapangan Bola Kaki/Futsal tidak sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.
Taman	-	✓	24	✓	-	Kebutuhan Taman tidak sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.
Lapangan Basket	-	✓	24	-	✓	Kebutuhan Lapangan Basket sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.
Lapangan Volly	-	✓	24	✓	-	Kebutuhan Lapangan Volly tidak sesuai antara NSPK dan Persepsi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, (2000) Beberapa Dimensi Ekonomi Perkotaan, Universitas Hasanuddin Makassar.

Anonim (1998) Kamus Tata Ruang, Edisi II Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Jakarta.

Azwar, 1996 : 89-90. Rumah sakit tipe-E adalah RS khusus (*special hospital*) yang menyelenggarakan hanya satu macam pelayanan kedokteran saja

Branch, Melville C. (1996) Perencanaan Kota Komprehensif (Pengantar dan Penjelasan), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Catanesse, Anthony J. – Snyder James C. (1996) Perencanaan Kota, *Edisi II*, Jakarta.

Jayadinata, J. T. (1992) Tata Guna Tanah dan Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, ITB, Bandung.

Kecamatan Kotamobagu Barat dalam angka, Tahun 2016 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotamobagu.

Koestoer, H. R. Dkk (2001) Dimensi Keruangan Kota (Teori dan Kasus), Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Menteri Kesehatan RI No. 983/Menkes/per/II/1992 yaitu "sarana upaya kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian." (*Hand Book of Institutionl Pharmacy Praticce*).

NSPK Pekerjaan Umum, No.10 Tahun 2010 tentang norma Standar Pelayanan Umum Kebutuhan

Prof. Dr.Hj. Zakiah, Rahmat,(2012), tentang fasilitas..

Reksohadiprodo, Dkk, Ekonomi Perkotaan, (2001) BPFE, Yogyakarta.

Rukmana, D. W. Nana. Dkk, (1997) Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan, LP3ES, Jakarta.

Sam (2012), tentang pelaksanaan suatu usaha.

Warpani (1980) Analisis Kota dan Daerah ITB, Bandung

Yunus, H. S. (Cet. III, 2002), Struktur Tata Ruang Kota, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

BOSOWA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Marsa Cikita Mokodongan (penulis) lahir di Kotamobagu pada tanggal 16 Mei 1995 dari ayah yang bernama Husrin Mokodongan, dan ibu bernama Nova Mokoginta. Penulis merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara. Penulis memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Kotamobagu pada tahun **2000** dan lulus pada sekolah tersebut tahun **2000**. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kotamobagu pada tahun **2000** dan lulus pada tahun **20**. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMK Cokroaminoto Kotamobagu pada tahun **2011** dan lulus pada tahun **2013**. Setelah lulus SMA, pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan disalah satu Perguruan Tinggi di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di Universitas Bosowa Makassar, Fakultas TEKNIK Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota.